

**ANALISIS *CHINA'S 13th FIVE-YEAR PLAN* DAN POLITIK LUAR
NEGERI TIONGKOK DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**

SKRIPSI



Oleh:

Silvanah

19323137

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

**ANALISIS *CHINA'S 13th FIVE-YEAR PLAN* DAN POLITIK LUAR
NEGERI TIONGGOK DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

Silvanah

19323137

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS CHINA'S 13th FIVE-YEAR PLAN DAN POLITIK LUAR
NEGERI TIONGKOK DALAM PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM
SKRIPSI**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
18 Januari 2023

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi


Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

Dewan Penguji

1. Muhammad Zulfikar Rakhmat, B.A., M.A., Ph.D
2. Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
3. Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.Si.

Tanda Tangan





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 29 Desember 2022



Silvanah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR SINGKATAN.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Cakupan penelitian.....	6
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Argumen Sementara.....	15
1.8 Metode Penelitian.....	17
1.8.1 Jenis Penelitian.....	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian.....	18
1.8.3 Metode Pengumpulan Data.....	18
1.8.4 Proses Penelitian.....	18
1.9 Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II PERMASALAHAN LINGKUNGAN TIONGKOK DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG TERTUANG DALAM <i>CHINA'S 13th FIVE-YEAR PLAN</i>.....	20
2.1 Permasalahan Lingkungan di Tiongkok.....	20
2.1.1 Polusi Udara di Tiongkok.....	22
2.1.2 Polusi Air di Tiongkok.....	25
2.2 Kebijakan Lingkungan Tiongkok dalam <i>China's 13th Five-Year Plan</i>	28

BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PERUBAHAN IKLIM DICANTUMKAN DALAM <i>CHINA'S 13th FIVE-YEAR PLAN</i>.....	31
3.1 Faktor Politik Domestik.....	39
3.1.1 Protes Masyarakat dan Tekanan Media Tiongkok terkait Masalah Polusi di Tiongkok.....	40
3.1.2 Tekanan NGO Lingkungan Tiongkok untuk Mencantumkan Kebijakan Adaptasi Iklim dalam <i>China's 13th Five-Year Plan</i>	45
3.1.3 Pengaruh Ideologi Partai Komunis Tiongkok dan Birokrasi NDRC dalam Penyusunan Target Iklim dalam <i>China's 13th Five-Year Plan</i>	48
3.2 Faktor Konteks Internasional.....	51
3.2.1 Kepatuhan Tiongkok dalam Perjanjian Multilateral UNFCCC dan Kerja Sama Bilateral tentang Perubahan Iklim AS-Tiongkok.....	51
3.3 Faktor Kondisi Ekonomi dan Militer.....	59
3.3.1 Perubahan Iklim Dianggap sebagai Ancaman Keamanan Nasional Holistik Tiongkok.....	59
BAB IV PENUTUP.....	64
2.1 Kesimpulan.....	64
2.2 Rekomendasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Teori <i>Decision Making</i>	11
Gambar 2 Emisi CO ₂ Tiongkok Tahun 2000-2015 (dalam Juta Ton).....	21
Gambar 3 Target Utama FYP ke-13 Tiongkok (2016-2020).....	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Faktor-Faktor Dikeluarkannya Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Penanganan Perubahan Iklim di dalam <i>China's 13th Five-Year Plan</i>	39
---	----

DAFTAR SINGKATAN

AS	: Amerika Serikat
BRI	: Belt and Road Initiative
COP	: Conference of Parties
CO ₂	: Karbon Dioksida
EIA	: Administrasi Informasi Energi
ETS	: Emission Trade System
EWR	: Enhanced Water Recovery
FYP	: Five Year Plan
GRK	: Gas Rumah Kaca
GBD	: Global Burden of Disease Study
INDC	: Intended Nationally Determined Contribution
IPCC	: Intergovernmental Panel on Climate Change
LULUCF	: Land Use, Land Use Change and Forestry
MEP	: Ministry of Environmental Protection
NDRC	: National Development and Reform Commission
NGO	: Non-governmental Organization
PDB	: Produk Domestik Bruto
PKT	: Partai Komunis Tiongkok
PLA	: People's Liberation Army
PM	: Particulate Matter
REED	: Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation
RMB	: Renminbi
UNFCCC	: United Framework Convention on Climate Change
VOC	: Volatile Organic Compounds
WHO	: World Health Organization

ABSTRAK

Dunia telah menyoroti Tiongkok sebagai salah satu negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Emisi karbon yang dihasilkan rata-rata didominasi oleh penggunaan batu bara berlebihan sebagai sumber energi utama di Tiongkok dan dikhawatirkan dapat mempercepat perubahan iklim. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Tiongkok pertama kalinya memasukan kebijakan iklim mengenai pembatasan penggunaan batu bara dalam *China's Five-Year Plan* di era Xi Jinping dengan target ambisius dimulai dari tahun 2016-2020. Penelitian ini akan berupaya menganalisis alasan dikeluarkannya kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori *Decision Making* oleh Coplin, dimana Coplin menyebutkan terdapat tiga faktor yang mempengaruhi suatu negara dalam pengambilan keputusan untuk orientasi kebijakan luar negerinya, diantaranya faktor politik domestik, konteks internasional dan faktor kondisi ekonomi dan militer.

Kata Kunci: *China's 13th Five-Year Plan*, Emisi Karbon, Perubahan Iklim, Tiongkok, Kebijakan Iklim, Teori Kebijakan Luar Negeri.

ABSTRACT

The world has highlighted China as one of the world's largest carbon emitters. The carbon emissions produced on average are dominated by the excessive use of coal as the main energy source in China and is feared to accelerate climate change. One of the efforts made was that China first included climate policies related to disclosure of coal use in China's Five Year Plan during the Xi Jinping era with a crisis target starting in 2016-2020. This research will try to analyze the reasons for issuing China's foreign policy in handling climate change in China's 13th Five Year Plan by using qualitative methods. In this study, the author will use Coplin's Decision Making theory, in which Coplin states that there are three factors that influence a country in making decisions for its foreign policy orientation, including domestic political factors, international context and economic and military conditions.

Keywords: *China's 13th Five-Year Plan*, Carbon Emissions, Climate Change, China, Climate Policy, Foreign Policy Theory.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiongkok merupakan negara di kawasan Asia Timur yang memiliki pertumbuhan yang paling signifikan, baik dalam sektor ekonomi maupun politiknya. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat sehingga sering dikatakan dengan berbagai julukan seperti keajaiban Tiongkok (*Chinese miracle*), kemudian kebangkitan sang naga (*rise of the dragon*), dan beberapa nama gelar lainnya yang memuji kemajuan perekonomian Tiongkok.

Namun, dibalik perkembangan ekonomi dan industrialisasi yang begitu pesat, Tiongkok memiliki permasalahan lingkungan yang sangat kompleks. Kerusakan lingkungan hidup dimulai sejak revolusi industri. Pertumbuhan perekonomian yang diikuti dengan meningkatnya jumlah pabrik dan transportasi membuat polusi udara dan polusi air di Tiongkok semakin memburuk. Tiongkok juga merupakan salah satu negara dengan tingkat populasi penduduk terbanyak di dunia, tentu aktivitas manusia akan menambah buruknya kualitas udara di Tiongkok seperti banyaknya pembangunan rumah, infrastruktur, pengguna teknologi dan lainnya (Gusman 2015).

Pada masa revolusi industri, berbagai aktivitas manusia, proses industrialisasi, kendaraan umum yang semakin berkembang menimbulkan dampak terhadap perubahan struktur alam. Sampai saat ini dalam proses industri, penggunaan batu bara merupakan unsur terpenting bagi Tiongkok. Namun dampak penggunaan bahan bakar tersebut akan menghasilkan karbon dioksida (CO₂). Tiongkok merupakan salah satu negara yang menyumbangkan emisi CO₂ terbesar di dunia dan emisi tersebut didominasi oleh penggunaan batu bara berlebihan di negaranya (Rochman 2019).

Keberhasilan Tiongkok menjadi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia terutama dipicu oleh penggunaan batu bara yang murah tetapi menjadi sumber polusi terbesar Tiongkok. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang dominan di sektor non transportasi, seperti pembangkit listrik, industri, perumahan dan jasa. Beberapa indikator fisik untuk batu bara, energi panas, semen dan baja menunjukkan pertumbuhan negatif pada tahun 2015 dengan 10,7 miliar ton emisi gas karbon (CNN Indonesia 2016).

Hal tersebut kemudian menjadikan Tiongkok memiliki signifikansi yang besar dan posisi yang penting dalam penyelesaian permasalahan lingkungan dalam memerangi perubahan iklim. Pada Desember 2015, telah dilaksanakan *Conference of Parties* (COP) yang ke-21 yang bertempat di Paris. Pertemuan tersebut membahas tentang pengurangan emisi gas rumah kaca di bumi serta implementasi apa saja yang dinilai efektif dalam menangani permasalahan lingkungan global yang kemudian menghasilkan sebuah perjanjian iklim yang disebut *Paris Agreement*. *Paris Agreement* secara hukum diberlakukan secara resmi pasca tahun 2020 dan telah diratifikasi oleh 195 negara di dunia. Salah satu negara industrialisasi maju yang meratifikasi *Paris Agreement* (Tempo 2015).

Menurut *China National Climate Change Assessment Report*, pemanasan global yang terjadi secara terus menerus telah menyebabkan seringnya terjadi peristiwa cuaca ekstrim, mencairnya es gletser, kenaikan permukaan laut, distribusi air yang tidak seimbang, dan produksi pertanian yang tidak stabil, sehingga berdampak pada pembangunan sosial ekonomi dan kesehatan masyarakat (Jing 2015). Kemudian Tiongkok memutuskan meratifikasi *Paris Agreement* pada tanggal 3 September 2016 mengingat urgensi dari perubahan iklim itu sendiri (BBC News Indonesia 2016).

Tiongkok juga mulai menerapkan *Five-Year Plan* (FYP) pada tahun 1953 untuk penyesuaian ekonomi dengan berbagai kebijakan serta untuk membicarakan hal tersebut secara langsung melalui birokrasi pemerintah. *Five-Year Plan* dirancang sebagai *roadmaps* untuk para pembuat regulasi dan pemerintah provinsi, yang nantinya akan bertanggung jawab akan implementasinya. *Five-Year Plan* dapat dikatakan sebagai indikator kunci dari arah tujuan dan pengembangan di Tiongkok.

China's Five-Year Plan masih berlangsung dan telah memasuki periode ke-14. Pada awal dicanangkan, *China's Five-Year Plan* hanya fokus di bidang pengembangan industri Tiongkok tanpa memikirkan efek buruk pada lingkungan akibat industrialisasi tersebut. Terbukti pada *China's Five-Year Plan* periode pertama yaitu pada tahun 1953-1957 yang di dalamnya terdapat program peningkatan produksi batu bara serta pada *China's Five-Year Plan* periode kelima. Di fase itu, sebanyak 8 pangkalan batu bara dan 10 pangkalan minyak dan gas harus didirikan (China Dialogue 2016).

Usaha memperhatikan masalah lingkungan oleh Tiongkok mulai dicanangkan ketika *China's Five-Year Plan* periode ke enam. Pada tahap ini, terdapat *environmental protection* dalam salah satu *framework* nya, namun di akhir periode tidak begitu terlihat hasil yang signifikan sehingga *framework* ini hilang. Usaha Tiongkok mulai terlihat lagi pada *China's Five-Year Plan* periode ke 10, saat akhir periode terlihat hasil yang signifikan terhadap lingkungan meliputi tingkat *forest coverage* yang mencapai 18,2% serta penurunan tingkat polusi mencapai 10% dibandingkan dengan tahun 2000 (Rongliang 2002). Mulai saat itu, pada periode *China's Five Year Plan* berikutnya, pemerintah Tiongkok mulai memperhatikan lingkungan. Puncaknya pada *China's 12th Five-Year Plan* dengan mengarah pada

tujuan utama *equality* serta menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan yang berkelanjutan (KPMG China 2011).

China's 12th Five-Year Plan (FYP-12) pada awalnya disiapkan oleh *National Development and Reform Commission* (NDRC) dengan adanya bimbingan dari Partai Komunis Tiongkok (PKT). *China's 12th Five-Year Plan* mulai diperdebatkan pada pertengahan Oktober 2010 di sidang paripurna kelima *17th Central Committee of the Communist Party of China* dan akhirnya dirilis pada 14 Maret 2011 (Xiang 2006). *China's 12th Five-Year Plan* mencoba untuk melakukan penstrukturan ulang ekonomi dalam negeri dengan cara meningkatkan konsumsi domestik, konservasi energi, dan penjagaan serta pembersihan lingkungan. Namun dalam perjalanannya hingga tahun 2012, yaitu masa pergantian pemerintahan, *China's 12th Five-Year Plan* tidak terlalu memberikan dampak yang signifikan dalam upaya menurunkan masalah lingkungan yang dihadapi Tiongkok, karena dalam implementasinya, pemerintahan terdahulu masih dilema antara menyeimbangan ekonomi dan melindungi lingkungan yang memerlukan biaya besar (KPMG China 2011). Hal ini menjadi sebuah dilema bagi Tiongkok sehingga dalam implementasi kebijakan energi dan lingkungannya masih sangat lemah. Tiongkok tetap tidak mengurangi konsumsi batu bara yang menjadi sumber utama masalah lingkungan di Tiongkok.

Sebelum Xi Jinping menjabat sebagai presiden Tiongkok, pemerintah sebelumnya, Hu Jintao telah meninggalkan berbagai masalah lingkungan yang kompleks di Tiongkok, terutama krisis lingkungan yang melanda Tiongkok. Di masa pemerintahan Hu Jintao, Tiongkok belum dapat menuntaskan masalah-masalah lingkungannya. Permasalahan emisi karbon akibat industrialisasi Tiongkok yang menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama membuat berbagai upaya yang telah dilakukan Tiongkok hingga penelitian ini dibuat masih sangatlah kurang.

Masalah polusi akibat konsumsi batu bara yang berlebihan menghasilkan karbon dioksida (CO₂) yang sangat parah dan masih menjadi masalah berat bagi Tiongkok. Pemerintah Tiongkok pun tidak langsung menyerah akan hal ini dan terus berupaya agar masalah polusi di negaranya teratasi (Ananda 2019).

Kemudian di periode selanjutnya, Tiongkok hadir dengan kebijakan baru dengan memasukkan kebijakan perubahan iklim yang pertama kali mengatur tentang pembatasan penggunaan energi batu bara dalam *China's 13th Five-Year Plan* (FYP-13) yang dipublikasi pada Desember 2015 melalui kesepakatan *China's National People's Congress*. *China's 13th Five-Year Plan* menetapkan target puncak untuk emisi karbon dan konsumsi energi dan air, serta sasaran untuk meningkatkan efisiensi industri dan menghilangkan fasilitas produksi yang ketinggalan zaman atau kelebihan kapasitas, meningkatkan produksi energi dari energi terbarukan, dan mengembangkan infrastruktur hijau (Climate Laws 2016). Tiongkok bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida per unit PDB sebesar 18% dari tingkat tahun 2015 pada tahun 2020, sejalan dengan janji Tiongkok pada konferensi COP21 di Paris pada bulan Desember 2015, dimana Presiden Xi Jinping menegaskan komitmen Tiongkok untuk mengurangi total emisi karbon per unit PDB sebesar 60-65% dari tingkat 2005 pada puncak tahun 2030 (Henderson and Joffe 2016).

Keambisiusan Tiongkok dalam menangani perubahan iklim tidak terlepas dari masalah lingkungannya yang begitu kompleks, dan banyaknya tuntutan dari berbagai pihak, baik dari lingkungan domestik maupun internasional. Maka dari itu, kejadian-kejadian yang dilalui oleh Tiongkok dalam kurun waktu 2010-2015, menjadi fokus dalam penelitian ini. Sudah ada penelitian tentang kebijakan luar negeri Tiongkok dalam memerangi perubahan iklim. Namun secara spesifik, penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis alasan dikeluarkannya kebijakan luar negeri

Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim yang tertuang dalam *China's 13th Five-Year Plan*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: *Mengapa Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negeri dalam menangani perubahan iklim melalui China's 13th Five-Year Plan?*

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi Tiongkok memuat kebijakan luar negeri dalam penanganan perubahan iklim melalui *China's 13th Five-Year Plan*.
2. Mengetahui permasalahan polusi udara di Tiongkok yang berkontribusi dalam mempercepat terjadinya perubahan iklim.
3. Mengetahui *China's 13th Five-Year Plan* dan berbagai kebijakan lingkungan Tiongkok yang termuat dalam *China's 13th Five-Year Plan*.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan luar negeri Tiongkok terkait penanganan perubahan iklim di era Xi Jinping yang tercantum dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Batasan waktu penelitian ini dimulai dari tahun 2011 sampai dengan 2015. Hal ini dikarenakan peneliti membutuhkan data beberapa tahun kebelakang sebelum *China's 13th Five-Year Plan* dirilis pada 17 Maret 2016. Hal ini dimaksudkan untuk mencari

faktor-faktor yang menjadi alasan dikeluarkannya kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. *Five-Year Plan* Tiongkok di era Xi Jinping ditargetkan mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Di bawah kepemimpinan Xi, pemerintah terlihat ambisius dalam menangani permasalahan lingkungan di Tiongkok dibandingkan dengan era kepemimpinan sebelumnya, dimana kebijakan-kebijakan lingkungan yang tercantum dalam *China's 13th Five-Year Plan* ini, Tiongkok pertama kalinya mengeluarkan kebijakan lingkungan terkait penanganan perubahan iklim yang mencakup kebijakan pembatasan penggunaan batu bara sebagai sumber energi utama Tiongkok yang menyumbang emisi karbon terbesar.

Upaya Tiongkok dalam menangani permasalahan lingkungannya, terutama terkait perumusan kebijakan luar negeri-nya mengenai penanganan perubahan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*, bukan hanya disebabkan oleh faktor pesatnya industri perekonomian ataupun tingginya tingkat populasi penduduk Tiongkok, melainkan juga karena banyaknya tuntutan dari berbagai pihak internal maupun eksternal. Dalam lingkup internal, terdapat kelompok kepentingan diantaranya *Non-governmental organization* (NGO) lingkungan, masyarakat Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok dan Birokrasi NDRC yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Begitu juga tuntutan eksternal, sebagai salah satu penyumbang emisi karbon terbesar di dunia, hal ini menekan Tiongkok untuk melakukan upaya domestik dalam mengurangi emisi di wilayahnya. Upaya ini ditujukan untuk menunjukkan citra Tiongkok kepada dunia bahwa negaranya tidak mengabaikan masalah iklim dengan tetap aktif pada forum negosiasi iklim dan kerja sama bilateral terkait perubahan iklim. Sebagai landasan dari kerangka pemikiran, penelitian ini akan menggunakan teori *decision making* dengan menekankan faktor

konteks internasional, faktor politik domestik dan faktor kondisi ekonomi dan militer Tiongkok.

1.5 Tinjauan Pustaka

Bunga Ayu Swastika menjelaskan dalam penelitiannya tentang posisi Tiongkok sebagai penyumbang gas rumah kaca terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, kemudian menjelaskan upaya pemerintah negara tersebut dalam penanganannya. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok memiliki komitmen kuat dalam mendorong pengembangan '*clean technology*' yang bertujuan membantu memperbaiki kualitas hidup masyarakat dan menurunkan emisi gas rumah kaca dengan cara mendorong investasi dan pertukaran teknologi *low carbon*. Penelitian deskriptif-analisis ini menggunakan konsep kebijakan publik sebagai landasan konseptualnya. Bunga menjelaskan bahwa suatu kebijakan memuat tiga elemen, yaitu identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai, taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, serta penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis dilihat pada fokus pembahasan dan konsepnya (Swastika 2014).

Kemudian Hidayat Chusnul Chotimah yang tentang Analisis Strategi Keamanan Energi dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon melalui Pendekatan Konstruktivisme (Chotimah 2017). Penelitian ini mengatakan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Tiongkok dalam menjalankan strategi keamanan energinya dalam rangka mewujudkan penurunan emisi karbon. Pemerintah Tiongkok akhirnya berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon setelah bertahun-tahun menolak membatasi tingkat konsumsi energinya karena upaya industrialisasi dan kebutuhan

ekonomi. Pemerintah Tiongkok telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk menjaga keamanan energinya dengan menyelaraskan perubahan iklim dengan kebijakan ekonominya. Tindakan yang diambil oleh pemerintah Tiongkok tidak hanya dilakukan karena adanya tekanan dari negara luar untuk melakukan komitmen perubahan iklim, tetapi juga didasarkan pada identitas Tiongkok yang terbentuk dari proses interaksi sosial dalam struktur internasional di bawah rezim *climate change* (Chotimah 2017).

Terakhir, penelitian Muhammad Anjum Saeed tentang China: Tackling Climate Change. Dalam penelitiannya, Anjum Saeed menjelaskan bahwa dalam Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), negara-negara anggota harus bekerja sama untuk mencapai tujuan mereka, dan memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk mengatasi masalah masalah perubahan iklim. Dalam kasusnya, dampak perubahan iklim sudah terlihat di Tiongkok misalnya, cuaca dingin dan panas yang ekstrim telah menjadi hal biasa di berbagai bagian negara. Saat ini, pencemaran lingkungan di Tiongkok meningkat pesat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Tiongkok telah melakukan upaya serius untuk mengembangkan teknologi energi terbarukan, untuk memperkenalkan cara baru konservasi energi, dan untuk mempromosikan teknik penyerap karbon dan teknologi adaptif lainnya.

Saeed juga menjelaskan bahwa Tiongkok juga telah mengambil langkah-langkah untuk mempercepat inovasi dan impor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan dukungan ilmiah yang kuat untuk mengatasi perubahan iklim dan mempromosikan kapasitas pembangunan berkelanjutan. Misalnya, Tiongkok telah mengambil langkah-langkah seperti peningkatan efisiensi energi, konservasi energi, memasang sumber energi baru terbarukan, menanam pohon secara luas, dan sedang mempertimbangkan untuk mengambil tindakan hukum berupa pajak

dalam upaya mengendalikan emisi karbonnya. Faktanya, setelah memeriksa pendekatan keseluruhan Tiongkok terhadap perubahan iklim, terbukti bahwa Tiongkok melihat masa depan yang memiliki lingkungan yang berkelanjutan, yang telah diciptakan dengan bantuan langkah-langkah kebijakan yang ditargetkan, peningkatan kerja sama internasional, dan kemajuan teknologi hijau (Saeed 2017).

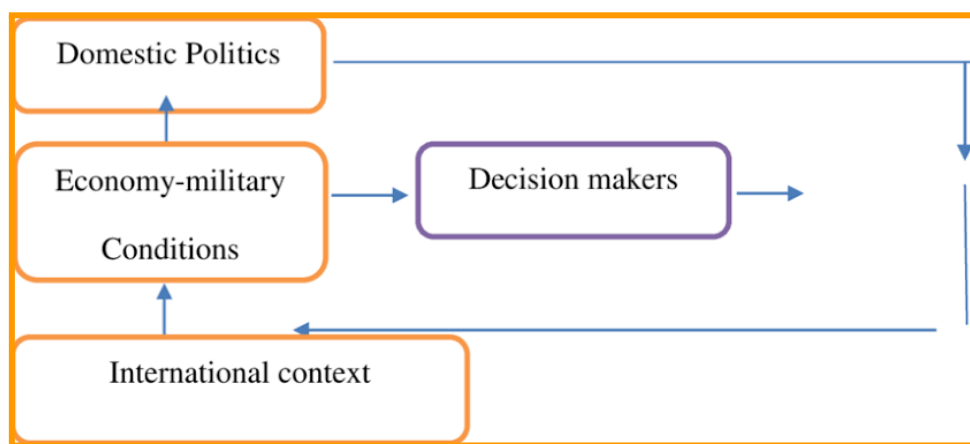
Berdasarkan jurnal penelitian yang telah diuraikan, telah banyak penelitian yang membahas isu lingkungan terkait penanganan perubahan iklim Tiongkok. Namun, dari penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik terkait *China's 13th Five-Year Plan* dan faktor dikeluarkannya kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim yang tercantum dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Dengan menggunakan teori kebijakan luar negeri, penelitian ini akan menganalisis, mengidentifikasi, serta menyempurnakan kekurangan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pasca berakhirnya Perang Dingin, isu lingkungan hidup telah menjadi salah satu isu yang berkembang dalam politik internasional. Saat ini, telah banyak kesepakatan atau perjanjian internasional yang dihasilkan melalui proses panjang dari sebuah negosiasi dan kerjasama internasional di bidang lingkungan hidup yang pada hakekatnya merupakan refleksi atas pilihan yang dibuat oleh suatu negara dalam orientasi kebijakan luar negerinya untuk menyikapi dinamika isu lingkungan di tingkat global. Penelitian ini menggunakan teori *decision making* dari William D Coplin untuk menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*.

Coplin menyebutkan terdapat tiga faktor utama untuk menilai kebijakan luar negeri suatu negara, seperti faktor politik domestik, konteks internasional dan kondisi militer dan ekonomi. Coplin menjelaskan teorinya di dalam bukunya yang berjudul “Introduction to International Political: Model of Decision Making Process”. Menurut Coplin, ketiga faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan suatu kebijakan dalam orientasi politik luar negeri suatu negara.

Gambar 1 *Peta Teori Decision Making*



Sumber: (Coplin 2003)

Berdasarkan ilustrasi Coplin yang dijelaskan diatas, penulis mengambil tiga variabel tersebut, yaitu faktor politik domestik (*domestic politic*), konteks internasional (*international context*), dan kondisi ekonomi dan militer (*economy and military conditions*) untuk menjelaskan latar belakang dikeluarkannya kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim yang tertuang di dalam *China's 13th Five-Year Plan*.

Pertama, dalam faktor politik dalam negeri (*domestic politic*), Coplin menyatakan “*untuk menentukan cara kerja politik luar negeri dapat dilihat dari*

situasi domestik suatu negara”. Situasi suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri baik oleh budaya maupun sistem politik negaranya (Coplin 2003). Coplin menjelaskan terdapat kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan untuk menekan pengambil kebijakan dalam memutuskan kebijakan. Kelompok kepentingan tersebut dapat bervariasi seperti birokrasi, partai, kelompok individu, media massa dan kelompok kepentingan lainnya. Meskipun negara adalah aktornya, rakyatlah yang bertanggung jawab untuk mengambil keputusan seperti aksi dan reaksi.

Kedua, konteks internasional (*international context*) yang menekankan kebijakan luar negeri yang dikeluarkan akan berdasarkan kalkulasi internasional. Konteks internasional tersebut dapat berupa sistem internasional hingga dukungan dari negara lain. Menurut Coplin, konteks internasional merupakan hasil politik luar negeri semua negara di masa lalu, saat ini, dan masa depan yang mungkin diantisipasi. dengan kata lain, hal itu berkaitan dengan kondisi suatu negara yang menjadi tujuan politik luar negeri dan pengaruh negara lain yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi (Coplin 2003).

Ketiga, kondisi ekonomi dan militer (*economy and military conditions*). Menurut Coplin, kapabilitas ekonomi dan militer suatu negara merupakan bagian dari instrumen politik luar negeri. Coplin menyatakan dalam bukunya bahwa kemampuan ekonomi suatu negara memegang peran penting dalam kebijakan luar negeri. Hal ini dikarenakan kemampuan ekonomi berfungsi sebagai instrumen politik luar negeri (Coplin, 2003). Penilaian terhadap kemampuan ekonomi suatu negara harus mencakup analisis kesejahteraan negara tersebut dan seberapa besar kekayaan yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dan pertumbuhan ekonominya (Ibid). Disamping itu, ekonomi dan militer merupakan dua variabel yang tidak dapat

dipisahkan. Pertumbuhan perekonomian akan menentukan kekuatan dan kelemahan militer suatu negara, sebaliknya ketika kemampuan militer meningkat, maka akan meningkatkan kemakmuran secara ekonomi.

Oleh karena itu, dalam konteks ini, penulis menggunakan ketiga variabel tersebut yaitu faktor politik domestik (politik dalam negeri), konteks internasional, dan kondisi ekonomi dan militer. Pada faktor domestik, penulis menganalisis bahwa Tiongkok mengeluarkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* didorong oleh beberapa tekanan dari kelompok kepentingan. Diantaranya tekanan dari masyarakat melalui media sosial dan media Tiongkok terkait masalah lingkungan Tiongkok yang memburuk. Ketidakpuasan publik yang berkembang dengan kondisi lingkungan negara yang memburuk telah dipercepat oleh tantangan masalah polusi yang paling terlihat, yaitu polusi udara dan polusi air. Kemudian pengaruh NGO lingkungan Tiongkok yang menekan pemerintah selanjutnya, di era Xi Jinping untuk memasukan kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Tekanan ini merespon hasil implementasi periode *China's 12th Five-Year Plan* di era Hu Jintao masih belum memberikan dampak signifikan dalam penurunan emisi karbon di Tiongkok sehingga penting untuk pemerintah selanjutnya dalam menetapkan target iklim yang lebih terperinci. Selain itu, yang paling mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* adalah karena pengaruh ideologi Partai Komunis Tiongkok yang memiliki prioritas pembangunan ekonomi dengan tetap menekankan tiga indikator penting terkait perubahan iklim yang diperkenalkan oleh pendahulunya: yaitu, pengurangan intensitas energi, pengurangan karbon intensitas, dan peningkatan pangsa energi bersih dalam konsumsi energi secara keseluruhan. Kemudian *National Development and Reform Commission* (NDRC) sebagai birokrasi pembuat kebijakan iklim paling kuat di pemerintah pusat

nantinya akan bertanggung jawab atas semua kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk penulisan kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* yang dibantu oleh para ilmuwan Tiongkok berdasarkan ideologi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Kemudian pada faktor konteks internasional, alasan dimasukkannya kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* Tiongkok juga didorong oleh kepatuhan Tiongkok pada UNFCCC. Tiongkok telah meratifikasi UNFCCC sejak tahun 1993 dan telah berpartisipasi dalam semua *Conference of Parties (COP)* tahunan UNFCCC. Pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping dan Presiden AS Barack Obama membuat pengumuman bersama yang bersejarah tentang perubahan iklim, mengumumkan tujuan emisi domestik dan rencana untuk bekerja sama menuju kesepakatan iklim global yang baru pada Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21 di Paris pada bulan Desember 2015. Pengumuman bersama menandai titik balik dalam negosiasi iklim global, dengan para pemimpin dari dua penghasil emisi terbesar dunia negara maju dan berkembang terbesar berjanji untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan global.

Terakhir, faktor kondisi ekonomi dan militer juga menjadi pendorong dimasukkannya kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Pemerintah Tiongkok mulai menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi keamanan nasional holistik Tiongkok termasuk keamanan ekonomi dan militer. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, Tiongkok perlu mereformasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan. Peningkatan ekonomi diharapkan terus bertumbuh untuk mempertahankan posisi Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, dan keuntungan perekonomiannya juga diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi kekuatan militer Tiongkok sebagai salah

satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan *Chinese dream* yaitu untuk menciptakan masyarakat makmur di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok

Dari tiga faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu faktor politik domestik, konteks internasional dan kondisi ekonomi dan militer akan menjadi pondasi untuk membangun argumen yang kuat terhadap alasan dikeluarkannya kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim melalui *China's 13th Five-Year Plan*. Terlebih lagi, tiga faktor tersebut disesuaikan dengan data-data yang relevan dan ilmiah selama kurun waktu 2011-2015.

1.7 Argumen Sementara

Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negeri dalam mengatasi perubahan iklim melalui *China's 13th Five-Year Plan* karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yaitu faktor politik domestik, konteks internasional serta kondisi ekonomi dan militer. Faktor-faktor tersebut didasari dengan kerangka pemikiran yang menggunakan teori *decision making* oleh Coplin (2003), yang mana menekankan kebijakan yang diambil oleh suatu negara tidak semata-mata atas keinginan pribadi dari pengambilan keputusan, namun sesuai dengan tiga faktor tersebut.

Secara hipotesis penulis menyatakan bahwa pada faktor domestik, pemerintah didorong untuk merumuskan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* karena pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan seperti tekanan dari masyarakat melalui media sosial dan media Tiongkok terkait masalah lingkungan Tiongkok yang memburuk. Ketidakpuasan publik yang berkembang dengan kondisi lingkungan negara yang memburuk telah dipercepat oleh tantangan masalah polusi yang paling terlihat, yaitu polusi udara dan polusi air. Kemudian pengaruh NGO lingkungan

Tiongkok yang menekan pemerintah selanjutnya, di era Xi Jinping untuk memasukan kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Tekanan ini merespon hasil implementasi periode *China's 12th Five-Year Plan* di era Hu Jintao masih belum memberikan dampak signifikan dalam penurunan emisi karbon di Tiongkok sehingga penting untuk pemerintah selanjutnya dalam menetapkan target iklim yang lebih terperinci.

Selain itu, yang paling mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* adalah karena pengaruh ideologi Partai Komunis Tiongkok yang memiliki prioritas pembangunan ekonomi dengan tetap menekankan tiga indikator penting terkait perubahan iklim yang diperkenalkan oleh pendahulunya: yaitu, pengurangan intensitas energi, pengurangan karbon intensitas, dan peningkatan pangsa energi bersih dalam konsumsi energi secara keseluruhan. Kemudian *National Development and Reform Commission* (NDRC) sebagai birokrasi pembuat kebijakan iklim paling kuat di pemerintah pusat nantinya akan bertanggung jawab atas semua kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk penulisan kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* yang dibantu oleh para ilmuwan Tiongkok berdasarkan ideologi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Kemudian pada faktor konteks internasional, alasan dimasukkannya kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* Tiongkok juga didorong oleh kepatuhan Tiongkok pada UNFCCC. Tiongkok telah meratifikasi UNFCCC sejak tahun 1993 dan telah berpartisipasi dalam semua *Conference of Parties* (COP) tahunan UNFCCC. Pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping dan Presiden AS Barack Obama membuat pengumuman bersama yang bersejarah tentang perubahan iklim, mengumumkan tujuan emisi domestik dan rencana untuk bekerja sama menuju kesepakatan iklim global yang baru pada Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21 di Paris pada bulan

Desember 2015. Pengumuman bersama menandai titik balik dalam negosiasi iklim global, dengan para pemimpin dari dua penghasil emisi terbesar dunia negara maju dan berkembang terbesar berjanji untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan global.

Terakhir, faktor kondisi ekonomi dan militer juga menjadi pendorong dimasukkannya kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Pemerintah Tiongkok mulai menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi keamanan nasional holistik Tiongkok termasuk keamanan ekonomi dan militer. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, Tiongkok perlu mereformasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan. Peningkatan ekonomi diharapkan terus bertumbuh untuk mempertahankan posisi Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, dan keuntungan perekonomiannya juga diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi kekuatan militer Tiongkok sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan *Chinese dream* yaitu untuk menciptakan masyarakat makmur di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Metode ini sering kali digunakan oleh peneliti-peneliti Hubungan Internasional dalam menganalisis studi kasus. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen pengumpulan data utama. Peneliti meneliti mengapa peristiwa terjadi, apa yang terjadi, dan dan lebih menguraikan uraian peristiwa. Maka daripada itu, metode ini akan digunakan sebagai

alat untuk menyelesaikan topik *China's 13th Five-Year Plan* dan Politik Luar Negeri Tiongkok dalam Penanganan Perubahan Iklim.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini berfokus pada negara Tiongkok dan objek yang akan diteliti adalah kebijakan luar negeri Tiongkok dalam menangani perubahan iklim yang tertuang dalam *China's 13th Five-Year Plan* ditinjau dari perspektif *decision-making*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini memfokuskan untuk menganalisis dengan sumber data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan, bahkan berita yang sudah tervalidasi kebenarannya.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dimulai dari proses pengumpulan data yang diperoleh dari data sekunder seperti buku, jurnal, ataupun laporan yang relevan dengan masalah lingkungan Tiongkok melalui internet. Setelah melakukan pengumpulan data, penulis akan mereduksi data. Hal ini dilakukan dengan tujuan memilah data-data yang lebih spesifik mengenai penelitian tersebut. Jika data sudah spesifik, penulis akan mulai menyajikan data dalam bentuk narasi sesuai dengan bab/sub-bab yang relevan maupun menyertakan grafik hingga tabel. Terakhir, penulis membuat kesimpulan terhadap data-data yang sudah diuraikan dengan sifat sementara. Sehingga, hipotesis tersebut nantinya akan diperkuat dengan data-data berikutnya.

1.9 Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, penelitian ini diuraikan menjadi empat bab utama:

- Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, cakupan penelitian, tujuan penelitian, kerangka pemikiran/landasan teori, kajian pustaka, hingga metodologi penelitian.
- Bab kedua akan menjelaskan mengenai masalah lingkungan Tiongkok dan *China's 13th Five-Year Plan* dengan menjelaskan berbagai kebijakan iklim yang tercantum di dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Bab ini akan menjadi pengantar dalam pengaplikasian teori yang akan dijelaskan pada bab tiga.
- Bab ketiga berisikan landasan konseptual yaitu teori Coplin yang memuat faktor-faktor yang menyebabkan pemerintah Tiongkok mengeluarkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Terdapat tiga variabel yang disebutkan Coplin, diantaranya faktor politik domestik, konteks internasional dan kondisi ekonomi dan militer. Ketiga faktor tersebut diuraikan dalam data-data relevan untuk menjelaskan alasan kebijakan iklim dicantumkan di dalam *China's 13th Five-Year Plan*.
- Terakhir, pada bab empat, penulis akan merumuskan sebuah kesimpulan dan saran sesuai hasil dari penelitian ini. Penulis akan menjelaskan kesimpulan yang mencakup jawaban dari pertanyaan penelitian ini dengan menguraikan alasan yang menjadi pendorong dikeluarkannya kebijakan iklim terkait pembatasan penggunaan batu bara dalam *China's 13th Five-Year Plan*.. Selanjutnya penulis akan merekomendasikan saran yang berguna untuk penelitian di masa depan.

BAB II

PERMASALAHAN LINGKUNGAN TIONGKOK DAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN YANG TERTUANG DALAM *CHINA'S 13th FIVE-YEAR PLAN*

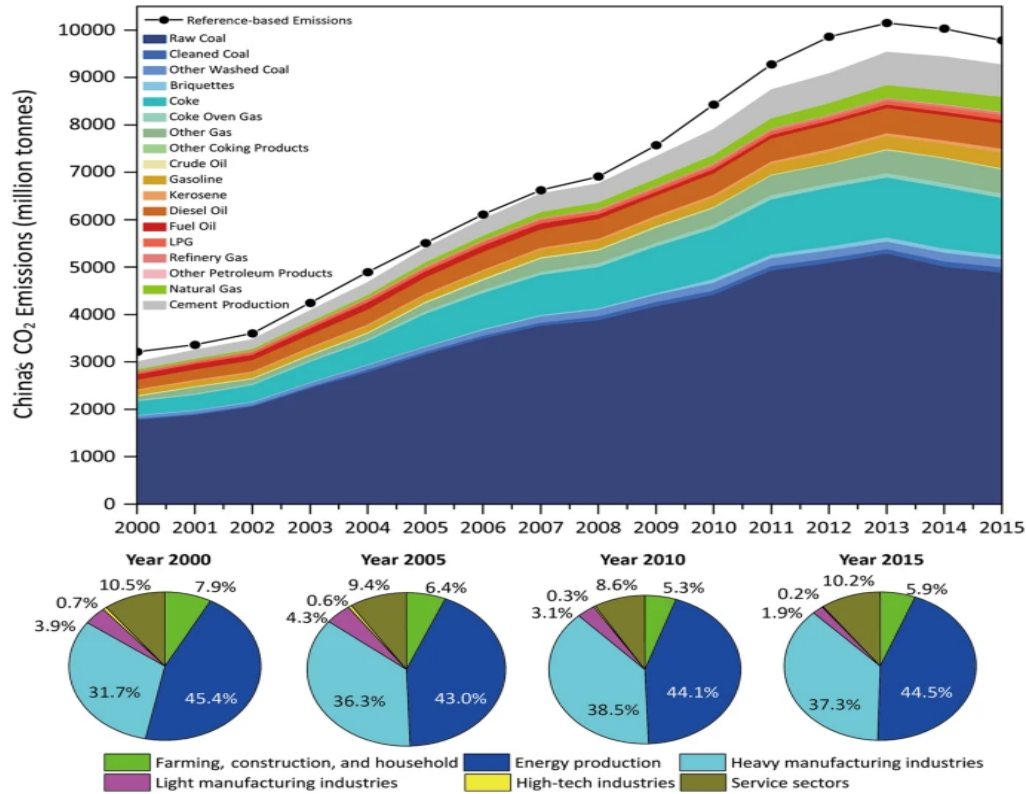
Bab I telah menguraikan dan menjelaskan mengenai latar belakang sebagai gambaran umum penelitian hingga metodologi yang menjadi basis dalam penelitian ini. Untuk melanjutkan pembahasan, bab II akan menjelaskan konteks yang berguna dalam memahami pembahasan di bab III. Bab ini akan dibagi menjadi dua sub-bab, pertama penulis akan menjelaskan permasalahan lingkungan yang berdampak besar pada perubahan iklim seperti masalah polusi udara dan polusi air yang terjadi di Tiongkok. Terakhir, penulis menguraikan penjelasan terkait *China's 13th Five-Year Plan* dan kebijakan-kebijakan lingkungan yang bertujuan dalam menangani dampak perubahan iklim yang tercantum di dalam *China's 13th Five-Year Plan*.

2.1 Permasalahan Lingkungan di Tiongkok

Menurut Eleanor Albert dari *Council on Foreign Relations*, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan di Tiongkok. Diantaranya adalah penggunaan energi, emisi karbon, hingga arus urbanisasi penduduk. Menurut *Energy Information Administration* (EIA), konsumsi energi utama Tiongkok sebagian besar berbasis pada penggunaan bahan bakar fosil yaitu batu bara yang telah menghasilkan emisi CO₂ tertinggi per unit energi. Pada gambar 2 menunjukkan total emisi CO₂ Tiongkok yang memuncak pada tahun 2013 (9.524,24 juta ton, emisi berbasis sektoral; 10.145, emisi berbasis referensi). Batu bara mentah adalah sumber utama emisi CO₂, menyumbang 52,58% dari total emisi pada tahun 2015. Kemudian empat diagram lingkaran di bawahnya menggambarkan struktur

sektoral dalam emisi CO₂ pada tahun 2000, 2005, 2010, dan 2015. Produksi energi dan industri manufaktur berat adalah kontributor utama emisi (Shan et al. 2018).

Gambar 2 Emisi CO₂ Tiongkok tahun 2000-2015 (dalam Juta Ton)



Sumber: (Shan et al. 2018)

Tiongkok merupakan negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia melampaui Amerika Serikat pada tahun 2007 dan bertanggung jawab atas emisi global sebanyak 27% pada tahun 2014. Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,372 miliar (pada tahun 2014) disertai dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) meningkat 7,4% pada tahun 2014, menyoroti Tiongkok harus memiliki peran serta posisi penting dalam menyelesaikan permasalahan lingkungannya (Woo and Holmes 2018).

Pesatnya pertumbuhan Tiongkok selama beberapa dekade telah menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan yang terkait langsung dengan perubahan iklim seperti masalah polusi udara dan polusi air. Terkait polusi udara, emisi polutan ke udara dapat mengakibatkan perubahan iklim. Polutan ini, termasuk gas rumah kaca, sering disebut sebagai kekuatan iklim. Ozon di atmosfer menghangatkan iklim, sementara berbagai komponen PM dapat menimbulkan efek pemanasan atau pendinginan pada iklim. Kemudian terkait polusi air dapat menyebabkan kerusakan pada atmosfer dan menghambat pertumbuhan tanaman dan alga. Penyerapan karbon dan pada gilirannya iklim dipengaruhi oleh polusi air. Berikut adalah penjelasan masalah polusi udara dan polusi air yang terjadi di Tiongkok.

2.1.1 Polusi Udara di Tiongkok

Polusi udara merupakan permasalahan lingkungan yang paling berdampak pada perubahan iklim. Polusi udara di Tiongkok disebabkan oleh emisi yang dihasilkan dari buangan gas dari mesin industri, penggunaan batu bara, emisi dari sektor konstruksi, serta emisi gas buang dari kendaraan bermotor. Masifnya kegiatan industrialisasi yang tidak diimbangi dengan peningkatan teknologi ramah lingkungan membuat Tiongkok memiliki masalah polusi udara yang buruk. Tercatat bahwa dari skala kota terkotor dunia, 16 diantaranya berada di Tiongkok yaitu Linfen dan Tianying sebagai kota penambangan dan proses produksi batu bara utama, Lanzhou dan Urumqi sebagai 10 besar kota terparah polusi. Kota lain dengan polusi udara terparah lainnya seperti Golmud, Shijiazhuang, Shizuishan, Datong, Taiyuan, Jilin, Hechi and Zhuzhou (Ma 2014).

Tiongkok merupakan negara produsen batu bara terbesar di dunia dan sekitar setengah dari konsumsi global batu bara dunia dipegang oleh Tiongkok sendiri.

Selain itu, hal lain yang menimbulkan masalah udara di Tiongkok adalah laju urbanisasi yang tinggi, tercatat peningkatannya sebesar 54,26% pada tahun 2014. Urbanisasi yang tinggi menyebabkan meningkatnya permintaan kebutuhan energi serta meningkatnya jumlah kepemilikan mobil sebanyak 17 juta mobil baru, menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok. Hal tersebut juga menyebabkan parahnya tingkat polusi udara di dalam negeri tersebut (CNN Indonesia 2016).

Polusi udara di Tiongkok disebabkan oleh penggunaan batu bara sebanyak kurang lebih 4 miliar ton per tahun. Batu bara adalah bahan bakar utama penggerak roda industri di Tiongkok menjadi penyebab parahnya polusi udara. Seperti contoh yang terjadi di kota Benxi, dimana aktivitas pembakaran batu bara terbesar di Tiongkok yaitu sebanyak kurang lebih 7 juta ton per tahun menghasilkan kabut tebal yang menutupi langit kota tersebut (Wong 2013). Parahnya polusi udara di Tiongkok telah menyebabkan terjadinya hujan asam di satu pertiga kota di Tiongkok, kemudian menyebabkan munculnya penyakit pernapasan serta masalah natalitas, seperti resiko cacat pada bayi. Sebuah studi oleh Institut Efek Kesehatan yang berkolaborasi dengan WHO menyatakan bahwa terdapat 1,2 juta kematian prematur di Tiongkok akibat polusi udara (Wong 2013).

Menurut data resmi Tiongkok yang dilaporkan oleh *New York Times*, pada tahun 2015 menunjukkan bahwa dalam bidang konsumsi energi, terutama energi batu bara meningkat sebanyak 17% dari tahun sebelumnya. Contoh salah satu kasus yang menunjukkan parahnya polusi udara di Tiongkok akibat konsumsi batu bara yang berlebihan adalah pada Januari 2013, kota Beijing tertutupi asap yang berkepanjangan. Partikel yang terkandung dalam polusi asap tersebut berada pada tingkat 40 di bawah standar yang diterapkan oleh World Health Organization (WHO) (Phillips and Lin 2015). Parahnya kasus polusi udara di Beijing tersebut hingga

menyebabkan pemerintah harus menutup sekolah, membatasi jalur lintas darat, menghentikan aktivitas konstruksi yang bersifat *outdoor*, hingga pemberhentian aktivitas produksi pada industri. Parahnya kondisi polusi udara di Beijing saat itu hingga masyarakat setempat menyebutnya dengan fenomena “*airpocalypse*” (CNN Indonesia 2016).

Pada Juni 2014, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Nasional merilis data yang menunjukkan bahwa rata-rata warga Beijing berusia 18 tahun akan menghabiskan sebanyak 40% dari sisa tahun mereka dalam kesehatan yang buruk berpotensi menderita kanker, penyakit kardiovaskular atau pernapasan. Memecah kesunyian pemerintah yang biasa tentang masalah ini, mantan menteri kesehatan Tiongkok, Chen Zhu, berbicara pada bulan Januari untuk mengungkapkan bahwa antara 350.000 dan 500.000 orang meninggal sebelum waktunya setiap tahun di sini akibat polusi udara. *Global Burden of Disease Study (GBD) 2015* mengidentifikasi paparan PM_{2.5} ambien sebagai faktor risiko yang signifikan dalam beban penyakit di Tiongkok dan bertanggung jawab atas 1,1 juta kematian pada tahun itu. Berdasarkan proyek GBD, Grup Bank Dunia memperkirakan bahwa biaya kematian dini akibat polusi udara (termasuk paparan dalam ruangan) mendekati 10% dari ekuivalen PDB pada tahun 2013 jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju di Eropa dan Amerika Utara. Tidak diragukan lagi, mengingat besarnya dampak polusi udara terhadap kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas udara telah menjadi domain sentral dalam mengembangkan peradaban ekologis di Tiongkok.

Masalah polusi udara yang buruk telah menimbulkan banyak tekanan publik terhadap pemerintah Tiongkok. Menanggapi tekanan yang meningkat, pemerintah telah memperkenalkan sejumlah undang-undang dan peraturan baru, meningkatkan denda untuk pelanggaran lingkungan, dan mencoba menutup pabrik-pabrik beremisi

karbon tinggi. Namun tindakan pemerintah tersebut hanya sedikit memberikan efek perbaikan. *“Untuk dapat memantau pabrik-pabrik ini, pejabat lokal harus mengunjungi mereka secara langsung,”* kata Zhang Kai, juru kampanye polusi udara di Greenpeace Asia Timur. *“Tetapi tidak ada kapasitas untuk melakukan itu, dan tidak ada kebijakan untuk menghukum pabrik-pabrik pencemar secara efektif”* (Martina and Macfie 2015).

2.1.2 Polusi Air di Tiongkok

Selain masalah polusi udara yang buruk terjadi di Tiongkok, polusi air juga merupakan masalah lingkungan yang paling krusial dan dikhawatirkan akan berdampak pada percepatan perubahan iklim. Pada tahun 2011, pencemaran air di Tiongkok semakin memburuk karena pembuangan bahan kimia industri, limbah pertanian, dan air limbah perkotaan telah mencemari sumber daya air di Tiongkok sehingga lebih dari separuh sungai di negara tersebut tidak aman untuk kontak manusia. Sekitar 70% pencemaran air secara nasional berasal dari pertanian, khususnya limpasan dari pupuk, pestisida, dan kotoran hewan. Kehadiran logam berat dalam makanan laut dan nasi menjadi semakin umum, menularkan kontaminasi air ke pasokan makanan. Pada saat yang sama, sementara sebagian besar penggunaan air berasal dari industri pertanian di pedesaan, rumah tangga miskin di daerah yang sama semakin dirugikan dalam hal mendapatkan air bersih.

Penipisan permukaan dan air tanah terus meningkat di Tiongkok, sementara kekeringan telah meningkat di beberapa daerah. Tiongkok Utara kekurangan air yang memadai, terutama mengingat populasinya yang besar. Pada saat yang sama, efisiensi penggunaan air rendah, dan tidak ada batasan permintaan air. Efisiensi penggunaan air yang rendah diabadikan oleh sistem hak air bersih yang tidak memadai.

Implementasi infrastruktur air limbah dan air yang tertinggal menyebabkan penggunaan air yang tidak efisien dan tercemar yang dibuang langsung ke lingkungan daripada menerima pengolahan yang tepat terlebih dahulu (Lai 2017).

Salah satu sungai di Tiongkok yang terkena dampak parah dari kasus pencemaran air adalah sungai Yangtze. Sungai Yangtze merupakan pusat aktivitas industri di Tiongkok yang menyumbang sekitar 40% PDB Tiongkok serta menjadi sumber air minum untuk 20 juta masyarakat di Shanghai dan 15 kota lainnya. Melalui investigasi yang dilakukan selama kurang lebih setahun oleh *Greenpeace*, ditemukan fakta bahwa ada kandungan kimia berbahaya yang sulit terurai serta dapat mengganggu sistem hormon yang dalam jangka panjang dapat mengancam kesehatan manusia serta lingkungan dalam sampel limbah cair di sungai tersebut. Pada tahun 2008 setidaknya 15% sungai di Tiongkok tidak memenuhi standar untuk menjadi sumber air minum. Pada tahun 2010, investigasi *Greenpeace* bahkan menemukan kandungan bahan kimia berbahaya serupa dalam sampel tubuh ikan yang biasa disantap dari sungai Yangtze (China Water Risk 2015).

Industri pabrik di Tiongkok telah menyebabkan saluran air di Tiongkok terkena debu dan limbah beracun. Industri yang menyebabkan polusi paling buruk meliputi kertas dan bubur kertas, makanan, bahan kimia, tekstil, penyamakan, dan pertambangan. Di Beberapa kota di Tiongkok, seperti Lanxi merupakan kota di provinsi Zhejiang yang dipenuhi dengan pabrik, mulai dari pabrik pengolahan mineral hingga pabrik semen dan kimia. Selama bertahun-tahun, limbah industri dan pertanian dibuang ke air tanpa diolah. Hal ini kemudian menghasilkan situasi suram di sepanjang sungai Lanxi di Tiongkok. Menurut laporan *Ministry of Environmental Protection* (MEP) menyatakan, sekitar 280 juta orang Tiongkok meminum air yang tidak aman. Hampir setengah dari sungai dan danau di Tiongkok mengalirkan air

yang tidak layak untuk disentuh manusia. Kemudian air yang tercemar menyebabkan angka kematian besar akibat penyakit kanker di Tiongkok melonjak, naik 80% dalam 30 tahun terakhir. Sekitar 3,5 juta orang didiagnosis menderita kanker setiap tahunnya, 2,5 juta diantaranya meninggal dunia. Penduduk pedesaan lebih mungkin meninggal karena kanker perut dan usus daripada penduduk perkotaan. Media negara melaporkan satu penyelidikan pemerintah yang menemukan 110 juta orang di seluruh negeri tinggal kurang dari satu mil dari lokasi industri berbahaya (Keyi 2014).

Selain industri pabrik, sektor pertanian Tiongkok juga memberi andil utama bagi buruknya kualitas polusi air di Tiongkok. Hal ini disebabkan karena Tiongkok merupakan konsumen dan produsen pestisida terbesar kedua di dunia. Sebagian besar pestisida dan insektisida yang dihasilkannya dicirikan oleh kadar racun yang tinggi maupun residu yang tinggi. Pada 2010, menurut *China Pollution Sources Census*, sektor pertanian menjadi sumber pencemaran air yang lebih besar di Tiongkok daripada limbah pabrik. Analisis sistematis dari pencemaran air pertanian ini dan konsekuensi kesehatan yang mungkin terjadi masih kurang. Tercatat, penggunaan pestisida di Tiongkok meningkat tajam, dari 0,76 juta ton pada tahun 1991 menjadi 1,8 juta ton pada tahun 2011, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 4,9%. Penggunaan pestisida per hektar kira-kira 1,5 sampai 4 kali lebih besar dari rata-rata dunia (Lai 2017).

Menurut laporan (China Water Risk 2015), kualitas air secara keseluruhan di wilayah sungai Tiongkok tetap relatif stabil pada tahun 2014. Kualitas air *Grade I-III* sungai Tiongkok sedikit memburuk dan menurun dari 71,7% pada tahun 2013 menjadi 71,2% pada tahun 2014. Sementara *Grade IV-V* naik dari 19,3% menjadi 19,8%; dan air yang tidak dapat digunakan untuk keperluan industri atau pertanian

(Grade V+) air tetap datar. Dengan demikian, air yang tidak layak untuk disentuh manusia meningkat dari 28,3% pada tahun 2013 menjadi 28,8% pada tahun 2014.

2.2 Kebijakan Lingkungan Tiongkok dalam *China's 13th Five-Year Plan*

Sejak tahun 1953, Tiongkok mulai menerapkan *Five-Year Plan* (FYP) yang bertujuan untuk penyesuaian ekonomi dengan berbagai kebijakan serta untuk membicarakan hal tersebut secara langsung melalui birokrasi pemerintah. *Five-Year Plan* dirancang sebagai *roadmaps* bagi para pembuat kebijakan dan pemerintah provinsi, yang nantinya akan bertanggung jawab dalam implementasinya. *China's Five-Year Plan* sering disebut sebagai salah satu dokumen kebijakan paling penting di dunia. Sebagai cetak biru kebijakan utama negara, *Five-Year Plan* menunjukkan arah Tiongkok berdasarkan serangkaian tujuan dalam segala hal mulai dari pertumbuhan ekonomi, kebijakan luar negeri, produksi pertanian hingga olahraga (Hu 2016).

China's Five-Year Plan masih berlangsung dan telah memasuki periode ke-14 dengan implementasi target mulai dari tahun 2021 hingga 2025. Pada awal dicanangkannya, *China's Five-Year Plan* hanya memiliki fokus di bidang pengembangan industri Tiongkok saja tanpa memikirkan dampak buruk pada lingkungan akibat industrialisasi tersebut. Hal ini terbukti pada *China's Five-Year Plan* periode pertama yaitu pada tahun 1953-1957 yang di dalamnya hanya fokus terhadap program peningkatan produksi batu bara, hingga *China's Five-Year Plan* pada periode ke-5, Tiongkok masih fokus menjalankan target produksi batu bara dimana 8 pangkalan batu bara dan 10 pangkalan minyak dan gas harus didirikan (China Power 2016).

Selanjutnya, *China's Five-Year Plan* pada periode ke-6 baru kemudian Tiongkok memasukan kebijakan yang mulai memperhatikan masalah lingkungan.

Dimana didalam *China's 6th Five-Year Plan* terdapat kebijakan *environmental protection*, namun di akhir periode implementasinya tidak begitu terlihat hasil yang signifikan sehingga *framework* ini hilang begitu saja. Namun usaha Tiongkok mulai terlihat lagi pada *China's 10th Five-Year Plan*, dimana saat akhir periode terlihat hasil yang signifikan terhadap lingkungan meliputi tingkat *forest coverage* yang mencapai 18,2% serta penurunan tingkat polusi mencapai 10% dibandingkan dengan tingkat polusi pada tahun 2000. Mulai saat itu, pada periode *China's Five-Year Plan* selanjutnya, pemerintah Tiongkok sudah mulai memperhatikan lingkungan.

Puncaknya pada *China's 12th Five-Year Plan*, Tiongkok mulai memasukkan kebijakan yang mulai mengarah pada tujuan utama *equality* serta menciptakan lingkungan untuk pertumbuhan berkelanjutan (Ananda 2019). Target *China's 12th Five-Year Plan* salah satu contohnya adalah: Tiongkok mengurangi energi dan intensitas karbon dari produk domestik bruto, tetapi total penggunaan energi nasional telah tumbuh pada tingkat yang dapat melebihi target 2015. Hasil investasi energi, produksi, dan polusi udara juga beragam. Di satu sisi, Tiongkok menginvestasikan lebih banyak daripada negara lain dalam energi terbarukan dan memasang rekor 12 giga watt kapasitas listrik tenaga surya baru pada tahun 2013. Namun di sisi lain, transisi dari batu bara telah diperumit oleh pengurangan kedua *shale* gas domestik, sehingga dapat dikatakan *China's 12th Five-Year Plan*, belum mampu menurunkan emisi karbon di Tiongkok (Aden and Lou 2014).

Terpilihnya Xi Jinping sebagai pemimpin baru Tiongkok, Xi menegaskan pada setiap pidatonya bahwa Tiongkok akan berfokus dan menjadikan masalah lingkungan menjadi prioritas utamanya dan akan menghukum dengan keras orang yang melanggar dan merusak lingkungan. Lebih dari 60 kali Xi mengucapkan hal tersebut ketika berpidato pada pertemuan *Belt and Road Initiative* (BRI). Xi juga

menekankan bahwa keamanan lingkungan bukan hanya masalah perorangan tetapi menjadi masalah bangsa (Ananda 2019).

Pada 17 Maret 2016, Tiongkok telah merilis *China's 13th Five-Year Plan* (FYP ke-13 Tiongkok) telah menetapkan kerangka kerja kebijakan pemerintah mulai tahun 2016 hingga 2020. Rencana tersebut menjabarkan target ekonomi tertentu seperti tingkat pertumbuhan PDB dan tujuan pembangunan sosial dalam mengatasi masalah lingkungan, kesehatan dan pendidikan (China Dialogue 2016). Khususnya, *China's 13th Five-Year Plan* memiliki fokus yang kuat untuk mengatasi tantangan lingkungan, dengan target dan langkah-langkah untuk mengatasi beberapa masalah keberlanjutan termasuk perubahan iklim, polusi udara, urbanisasi, dan transportasi (Qin 2016).

Rencana ini memberikan prioritas utama pada pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat pertumbuhan PDB 6,5-7% per tahun, dan konsisten dengan tujuan menjadikan 'masyarakat yang cukup makmur' pada tahun 2020, sesuai dengan lima prinsip utama yaitu, inovatif, terkoordinasi, hijau, terbuka, dan pembangunan bersama (Haacke, n.d.). Pada saat yang sama, *China's 13th Five-Year Plan* telah menetapkan target puncak emisi karbon dan konsumsi energi dan air, serta sasaran untuk meningkatkan efisiensi industri dan menghilangkan fasilitas produksi yang ketinggalan zaman atau kelebihan kapasitas, meningkatkan produksi energi ke energi terbarukan, dan pengembangan infrastruktur hijau. Berikut beberapa kebijakan lingkungan yang dimasukkan dalam *China's 13th Five-Year Plan*:

a. Emisi Karbon

Tiongkok bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida per unit PDB sebesar 18% dari tingkat tahun 2015 pada tahun 2020, sejalan dengan janji Tiongkok pada konferensi COP21 di Paris pada bulan Desember 2015, dimana Presiden Xi Jinping menegaskan komitmen Tiongkok untuk

mengurangi total emisi karbon per unit PDB sebesar 60-65% dari tingkat 2005 pada tahun 2030 dan puncak emisi karbon pada tahun 2030. *China's 13th Five-Year Plan* ini juga memberikan tugas bagi pemerintah untuk mengembangkan aturan dan regulasi untuk mengelola program perdagangan karbon nasional yang akan dikembangkan berdasarkan perluasan tujuh skema percontohan yang ada dan diharapkan akan diluncurkan sekitar tahun 2018.

b. Energi

Untuk mencapai target energi, *China's 13th Five-Year Plan* menetapkan target dan pencapaian sektoral. *Pertama*, menetapkan tujuan lebih lanjut untuk mengurangi konsumsi energi per unit PDB setidaknya tambahan 3,4% pada tahun 2016. *Kedua*, membatasi konsumsi energi total Tiongkok pada 5 miliar metrik ton setara batu bara yang standar pada tahun 2020, meningkat 16,3% pada tahun 2020. Dalam perjalanannya, target ini dicapai dengan tujuan agar bauran produksi energi Tiongkok diatur untuk melakukan diversifikasi dan beralih dari batu bara ke proporsi energi terbarukan yang lebih besar. Tiongkok meningkatkan efisiensi pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dan juga berencana untuk menutup boiler berbahan bakar batu bara yang gagal memenuhi standar nasional, dan telah membatasi pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara.

Rencana tersebut juga mendukung peningkatan kapasitas dan koneksi energi terbarukan melalui dukungan pemerintah pusat untuk produksi energi angin, surya, dan biomassa. Pemerintah juga akan terus berinvestasi dalam proyek pembangkit listrik tenaga air terbarukan, penyimpanan energi dan

tenaga nuklir, serta peningkatan lebih lanjut dalam *smart networks* dan transmisi listrik tenaga ultra (Climate Change Laws of the World 2016). Berikut indikator yang menjadi target utama dalam *China's 13th Five-Year Plan* ditujukan pada tabel dibawah ini.

Gambar 3 Target Utama FYP ke-13 Tiongkok (2016-2020)

Indicator		2015	2020	Average Annual Growth Rate
Domestic Economy				
GDP (trillion RMB)		67.7	>92.7	>6.5
Tertiary Industry Value Added (%)		50.5	56	-
Social Development				
Poverty Population in Rural Area (million)		55.75	0	-
Basic Pension Insurance Enrolment Rate (%)		82	90	-
Innovation				
R&D Investment Intensity (%)		2.1	2.5	-
Patent Ownership per ten thousand population (Number of Items)		6.3	12	-
Internet Coverage	Fixed Broadband Coverage (%)	40	70	-
	Mobile Broadband Coverage (%)	57	85	-
Natural Resources & Environment				
Energy Intensity Per Unit of GDP (%)		-	-	-15*
Carbon Intensity Per Unit of GDP (%)		-	-	-18*
Proportion of Non-fossil Energy in Primary Energy Consumption (%)		12	15	-
Air Quality	Percentage of Days with Air Quality Rating 'Good' or 'Excellent' in Cities (%)	76.7	>80	-
	PM 2.5 Density in Cities (%)	-	-	-18*
Reduction of Major Pollutants Emission (%)	Chemical Oxygen Demand	-	-	-10*
	Ammonia	-	-	-10*
	Sulphur Dioxide (SO ₂)	-	-	-15*
	Nitrogen Oxides (NO _x)	-	-	-15*
Note: Figures with * represent cumulative growth rate over the five years.				

Sumber: (United Nations Development Programme 2016)

Pada gambar 3 menunjukkan beberapa target *China's 13th Five-Year Plan* dengan beberapa indikator diantaranya ekonomi domestik, pembangunan sosial, inovasi, koordinasi, dan pembangunan hijau yang bertujuan untuk membangun “*masyarakat yang cukup sejahtera*”, dengan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan penekanan yang sama pada

perlindungan lingkungan, serta mempromosikan pembangunan inklusif. Pada indikator pembangunan hijau termasuk perubahan iklim, *China's 13th Five-Year Plan* memiliki serangkaian target untuk pengelolaan sumber daya alam air, tanah, udara, hutan, dan keanekaragaman hayati. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam perencanaan lima tahun, pengurangan *Volatile Organic Compounds* (VOCs) komponen penting PM2.5 dan emisi ozon dari semua jenis proses industri sebesar 10% atau lebih, dicantumkan dalam agenda. Selain itu, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim terus menjadi prioritas utama di *China's 13th Five-Year Plan* sejak diadopsi di *China's 12th Five-Year Plan*. Mengenai yang pertama, perubahan terbesar adalah bahwa Tiongkok akan membentuk skema *Emission Trade System* (ETS) pada tahun 2017, yang akan membutuhkan sejumlah besar perusahaan di sektor utama untuk melaporkan, memverifikasi, dan mengelola emisi karbon mereka. Rencana tersebut juga mencakup target konsumsi energi yang dibatasi hingga 5 miliar ton setara batubara pada tahun 2020 (Climate Change Laws of the World 2016).

Reformasi model ekonomi Tiongkok ke pembangunan ekonomi berkelanjutan telah memberikan dampak positif terhadap upaya penanganan perubahan iklim. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah yang melakukan pemotongan kapasitas di sektor baja dan batu bara. Misalnya melakukan pengurangan kapasitas baja mentah tahunan sebesar 100 hingga 150 juta metrik ton (13% dari kapasitas tahun 2016). Demikian pula pemerintah melakukan pemotongan produksi batu bara sebesar 500 juta metrik ton (9% dari kapasitas tahun 2016) akan terjadi dalam tiga hingga lima tahun ke depan (Haacke, n.d.)

c. Transportasi

Langkah-langkah tujuan transportasi dalam *China's 13th Five-Year Plan* terkait erat dengan mengatasi polusi udara, untuk mempertahankan tingkat kualitas udara yang dapat diterima di kota-kota besar selama 80% per hari pada akhir tahun 2020. Rencana tersebut bertujuan untuk memperluas pasar kendaraan listrik, dengan membangun tempat parkir khusus dan fasilitas pengisian daya, serta memindahkan hampir 4 juta kendaraan beremisi tinggi dari jalan raya. Rencana tersebut akan terus mendukung adopsi “kendaraan energi terbarukan” rendah emisi melalui subsidi kepada pembuat mobil, pemerintah daerah juga melakukan pembelian armada hijau, dan memberikan keringanan pajak serta pendaftaran gratis bagi konsumen.

d. REDD+ dan LULUCF

China's 13th Five-Year Plan juga bertujuan untuk memodernisasi produksi pertanian komersial untuk mengurangi kelebihan kapasitas, sementara bertujuan untuk mengubah 1 juta hektar lahan pertanian marginal menjadi hutan atau padang rumput. Dalam upaya mengurangi polusi udara, rencana tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan tutupan hutan menjadi 23,04% selama lima tahun kedepan (2016-2020) (Haacke, n.d.).

Dengan prinsip inovasi, koordinasi, pembangunan hijau, pembukaan *up and sharing*, yang mewakili teori perkembangan kepemimpinan negara Tiongkok telah berusaha untuk membangun “*masyarakat yang cukup sejahtera*”, dengan mempertahankan ekonomi pertumbuhan dengan penekanan yang sama pada perlindungan lingkungan, serta mempromosikan pembangunan inklusif (lihat

gambar 3). Salah satu alasan utama untuk mengharapkan kemajuan dalam *China's 13th Five-Year Plan* adalah penambahan target untuk mengurangi Senyawa Organik Volatil (VOC). Rencana tersebut bertujuan untuk mengurangi VOC secara nasional sebesar 10% atau lebih, dengan penekanan pada kota-kota besar dan industri (Seligsohn and Hsu 2016).

Presiden Xi Jinping telah mengambil alih kepemimpinan, membuat rencana, dan mendukung upaya untuk membangun masyarakat yang cukup sejahtera dalam segala hal. Dalam beberapa tahun terakhir, industrialisasi yang pesat, produksi pertanian yang intensif dan urbanisasi di Tiongkok telah membawa kemakmuran yang lebih besar dan standar hidup yang lebih tinggi bagi banyak orang, tetapi juga menciptakan permintaan yang tinggi akan energi dan bahan baku, meningkatkan tekanan pada ekosistem dan mempengaruhi hasil kesehatan. Dibandingkan dengan aksi iklim yang ditargetkan dalam *Five-Year Plan* sebelumnya, dalam *China's 13th Five-Year Plan* telah memberikan kontras yang menarik dengan menetapkan target terukur dan merinci aksi lingkungan. Meskipun *China's 12th Five-Year Plan* adalah rencana lima tahun pertama untuk mempertimbangkan masalah perubahan iklim, hal itu tidak memberikan target konsumsi energi total atau memberikan detail terperinci tentang teknik mitigasi itu sendiri. Detail yang meningkat di *China's 13th Five-Year Plan* menunjukkan peningkatan fokus dan sumber daya yang dicurahkan Tiongkok untuk aksi iklim. Di era Xi Jinping, Tiongkok telah mencapai kemajuan ekologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Konsumsi energi per unit PDB turun 13,2% antara tahun 2015 dan 2019, penduduk kota sekarang menghirup udara yang tidak tercemar selama 82% per hari dalam setahun, dan kualitas air telah meningkat ke tingkat yang baik (Embassy of the People's Republic of China 2021).

BAB III

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
PERUBAHAN IKLIM DICANTUMKAN DALAM *CHINA'S 13th*
*FIVE-YEAR PLAN***

Bab II telah menjelaskan mengenai masalah polusi lingkungan yang dihadapi Tiongkok dan kebijakan lingkungan yang tercantum dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Pada bagian tersebut telah diuraikan masalah polusi lingkungan yang paling berdampak pada perubahan iklim yaitu kasus polusi udara dan masalah polusi air. Selanjutnya, bab tersebut juga telah menjelaskan dan menguraikan berbagai kebijakan lingkungan yang ditargetkan Tiongkok dalam *China's 13th Five-Year Plan* (2016-2020). Tiongkok pertama kalinya mengeluarkan target dalam *China's 13th Five-Year Plan* tentang kebijakan iklim yang mengatur pembatasan penggunaan batu bara dalam aktivitas industri Tiongkok. Hal ini dikarenakan lintasan pertumbuhan Tiongkok telah menghadirkan banyak masalah keamanan yang terkait langsung dengan perubahan iklim.

Maka daripada itu, untuk melanjutkan pembahasan penelitian ini, bab III akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan Tiongkok mengeluarkan kebijakan luar negeri dalam penanganan perubahan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Dalam analisisnya, penulis akan menggunakan teori *decision making* dari William D. Coplin (lihat bab I). Dalam teorinya, Coplin menekankan tiga faktor utama untuk menilai kebijakan luar negeri suatu negara, seperti faktor politik domestik, konteks internasional dan kondisi militer dan ekonomi. Dalam konteks ini, penulis menggunakan ketiga variabel tersebut yaitu faktor politik

domestik (politik dalam negeri), konteks internasional, dan kondisi ekonomi dan militer.

Pada faktor domestik, penulis menganalisis yang mendorong pemerintah Tiongkok merumuskan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* karena pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan seperti tekanan dari masyarakat melalui media sosial dan media Tiongkok terkait masalah lingkungan Tiongkok yang memburuk. Selain itu, NGO lingkungan Tiongkok yang menekan pemerintah selanjutnya, di era Xi Jinping untuk memasukan kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Tekanan ini merespon hasil implementasi periode *China's 12th Five-Year Plan* di era Hu Jintao masih belum memberikan dampak signifikan dalam penurunan emisi karbon di Tiongkok. Yang paling mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* adalah karena pengaruh ideologi Partai Komunis Tiongkok yang memiliki prioritas pembangunan ekonomi dengan tetap menekankan tiga indikator penting terkait perubahan iklim yang diperkenalkan oleh pendahulunya: yaitu, pengurangan intensitas energi, pengurangan karbon intensitas, dan peningkatan pangsa energi bersih dalam konsumsi energi secara keseluruhan. Kemudian *National Development and Reform Commission* (NDRC) sebagai birokrasi pembuat kebijakan iklim paling kuat di pemerintah pusat nantinya akan bertanggung jawab atas semua kebijakan yang dicantumkan berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk penulisan kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* yang dibantu oleh para ilmuwan Tiongkok berdasarkan ideologi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Kemudian pada faktor konteks internasional, alasan dimasukkannya kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* Tiongkok juga didorong oleh kiprah

Tiongkok dalam perjanjian lingkungan internasional yang mendorong Tiongkok turut aktif dalam negosiasi iklim. Tiongkok telah meratifikasi UNFCCC sejak tahun 1993 dan telah berpartisipasi dalam semua *Conference of Parties (COP)* tahunan UNFCCC. Pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping dan Presiden AS Barack Obama membuat pengumuman bersama yang bersejarah tentang perubahan iklim, mengumumkan tujuan emisi domestik dan rencana untuk bekerja sama menuju kesepakatan iklim global yang baru pada Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21 di Paris pada bulan Desember 2015. Pengumuman bersama menandai titik balik dalam negosiasi iklim global, dengan para pemimpin dari dua penghasil emisi terbesar dunia negara maju dan berkembang terbesar berjanji untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan global.

Terakhir, faktor kondisi ekonomi dan militer juga menjadi pendorong dimasukkannya kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Pemerintah Tiongkok mulai menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi keamanan nasional holistik Tiongkok termasuk keamanan ekonomi dan militer. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, Tiongkok perlu mereformasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan. Peningkatan ekonomi diharapkan terus bertumbuh untuk mempertahankan posisi Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, dan keuntungan perekonomiannya juga diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi kekuatan militer Tiongkok sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan *Chinese dream* yaitu untuk menciptakan masyarakat makmur di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Tabel 1. Faktor-Faktor Dikeluarkannya Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dalam Penanganan Perubahan Iklim di dalam *China's 13th Five-Year Plan*

Faktor Politik Domestik	Faktor Konteks Internasional	Faktor Kondisi Ekonomi dan Militer
<ul style="list-style-type: none"> ● Protes masyarakat Tiongkok dan tekanan media Tiongkok terkait masalah polusi yang memburuk di Tiongkok. ● Pengaruh NGO lingkungan Tiongkok yang menekan pemerintah untuk memasukkan kebijakan adaptasi iklim dalam <i>China's 13th Five-Year Plan</i>. ● Pengaruh Partai Komunis Tiongkok dan birokrasi NDRC dalam proses penyusunan kebijakan <i>China's 13th Five-Year Plan</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kepatuhan Tiongkok dalam perjanjian multilateral UNFCCC yang mendorong Tiongkok turut aktif dalam negosiasi dan upaya iklim. ● Adanya kerja sama bilateral tentang perubahan iklim antara AS-Tiongkok yang mengharuskan keduanya untuk memenuhi komitmen mengurangi emisi domestik karena keduanya merupakan penyumbang emisi global. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Perubahan iklim telah dianggap sebagai salah satu ancaman bagi keamanan nasional holistik Tiongkok termasuk keamanan ekonomi dan militer. Tiongkok perlu mereformasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan dan menguntungkan untuk mewujudkan <i>Chinese dream</i> yaitu untuk menciptakan masyarakat yang cukup makmur dibawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

3.1 Faktor Politik Domestik

3.1.1 Protes Masyarakat dan Tekanan Media Tiongkok terkait Masalah Polusi di Tiongkok

Masalah polusi udara yang serius di Tiongkok telah menarik perhatian para aktivis *online* yang menginginkan pemerintah mengambil tindakan cepat dalam penanganannya. Protes lingkungan menjadi salah satu bentuk kerusuhan sosial terbesar di Tiongkok. Beberapa dekade sebelumnya, ketidakpuasan publik berkembang karena kondisi lingkungan negara yang semakin memburuk dipercepat oleh tantangan masalah polusi yang paling terlihat, yaitu polusi udara dan polusi air akibat aktivitas industrialisasi yang buruk di Tiongkok. Meningkatnya peristiwa cuaca ekstrim menjadi perhatian khusus bagi Tiongkok, yang memiliki proporsi tinggi 26,6% penduduk perkotaan yang tinggal di kota-kota pesisir dataran rendah, dibandingkan dengan negara lain (Ruwitch and Tait 2014).

Menurut sebuah studi oleh (Balk dkk. 2011), daerah pesisir dataran rendah ini sangat rentan terhadap peristiwa semacam itu dan sudah terjadi di kota-kota besar di Tiongkok seperti Beijing, yang mengalami hujan terberat dalam hampir enam dekade dan menyebabkan sedikitnya 12 orang tewas atau terluka dalam musim panas tahun 2012. Kasus kabut asap tebal yang juga sering melanda di Beijing dan tempat lain di Tiongkok telah menjadi isu besar yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Tiongkok. Kombinasi dari meningkatnya keluhan masyarakat tentang kabut asap dan meningkatnya standar hidup tidak hanya membuat masyarakat merasa perlunya lebih banyak langkah-langkah anti polusi, tetapi juga meningkatkan dukungan publik terhadap kebijakan dan langkah-langkah tersebut (Jiang 2012).

Kasus lain yang terjadi pada 16 Mei 2013, protes masyarakat di kota Kunming di Provinsi Yunnan atas rencana untuk pembangunan sebuah pabrik petrokimia di dekat kota Anning. Ini merupakan protes besar kedua atas kilang yang akan di bangun oleh China National Petroleum Corp. Kilang tersebut akan memproses lebih dari 10 juta ton minyak mentah per tahun dan 500.000 ton bahan kimia industri paraxylene (PX). Tiongkok merupakan negara yang memproduksi PX terbesar di dunia yang digunakan dalam proses pembuatan botol plastik. Menurut laporan South China Morning Post yang berbasis di Hong Kong, mengutip seorang pengunjung rasa berusia 24 tahun yang mengatakan “*Saya harap ini bisa menjadi awal yang baik untuk dialog antar masyarakat dan pemerintah tentang keputusan besar*”.

Protes tersebut menjadi salah satu topik hangat di *platform* media sosial Tiongkok Sina Weibo dan foto-foto pengunjung rasa yang mengenakan masker dan spanduk melambai-lambai dipasang. Penduduk di daerah itu berbaris dengan damai meneriakkan dan memegang tanda bertuliskan "*tidak ada pabrik di sini*". Protes tersebut direspons oleh media pemerintah yang melaporkan bahwa pabrik yang akan dibangun oleh Hefei Guoxuan High-tech Power Energy Co Ltd itu tidak akan dilanjutkan karena tekanan publik (Duggan 2013). Para peneliti di The Ohio State University menganalisis sekitar 250.000 postingan di situs media sosial Tiongkok *Sina Weibo* (mirip dengan *Twitter*) yang membahas masalah polusi di negara tersebut. Selama beberapa dekade, pemerintah Tiongkok menyalahkan kabut atau debu pada hari-hari berkabut. Laporan pemerintah benar-benar mengabaikan polutan tertentu, seperti PM2.5, yang merupakan partikulat udara berdiameter 2,5 mikrometer atau kurang. Karena ukurannya yang kecil, PM2.5 dapat menembus jauh ke dalam sistem kardiovaskuler dan

pernapasan. Warga Tiongkok mulai memposting tentang masalah ini di *Sina Weibo*, bertanya-tanya mengapa tidak ada informasi resmi tentang PM2.5 dan meminta tindakan dari pemerintah Tiongkok.

Meskipun advokasi para aktivis ini terkadang hanya sedikit yang berhasil, Sui seorang peneliti di The Ohio State University mengatakan aktivis *online* ini tetap berdampak. “*Akhirnya, pemerintah pusat Tiongkok mengakui masalah polusi udara, menetapkan pedoman polusi udara baru, dan memperkenalkan mekanisme penegakan baru*”. “*Media sosial meningkatkan kesadaran publik dan menekan pemerintah untuk mengambil tindakan. Itu memiliki kekuatan yang sangat besar seperti itu. Jika tidak, pemerintah tidak akan melakukan sebanyak yang mereka lakukan,*” kata Sui.

Publik Tiongkok semakin khawatir tentang keadaan lingkungan lokal mereka dan hingga 80% percaya bahwa perlindungan lingkungan harus menjadi prioritas yang lebih tinggi daripada pembangunan ekonomi. Menurut survei yang dilakukan oleh *Public Opinion Research Center* yang bekerjasama dengan Shanghai Jiao Tong University ini mengukur sikap masyarakat terhadap perlindungan lingkungan dan bagaimana mereka menilai kinerja pemerintah. Protes semacam itu tampaknya sering ditoleransi oleh pihak berwenang dan, seperti protes Shanghai, terkadang berhasil mencapai tujuannya.

Selain desakan yang berasal dari masyarakat dan aktivis melalui media sosial, pada tahun 2013, media Tiongkok juga mendesak pemerintah agar mengambil tindakan segera untuk mengatasi polusi udara, yang telah menyelimuti beberapa bagian negara pada tingkat berbahaya dalam beberapa hari terakhir, dan satu surat kabar menyerukan untuk memikirkan kembali “*fiksasi*” pada pertumbuhan ekonomi. Media Tiongkok berada di bawah kendali ketat Partai

Komunis dan biasanya menghindari kontroversi, tetapi organisasi berita lebih bebas melaporkan polusi, sebagian karena tidak dapat disembunyikan dari publik. *People's Daily*, surat kabar resmi Partai Komunis, mengatakan bahwa kualitas udara di Beijing jauh di atas tingkat berbahaya selama akhir pekan, mencapai 755 pada indeks yang mengukur partikel di udara dengan diameter 2,5 mikrometer. Level 300 dianggap berbahaya sementara WHO merekomendasikan level harian tidak lebih dari 20. “*Bagaimana kita bisa keluar dari pengepungan polusi yang menyesakkan ini?*”. Banyak kota lain menunjukkan polusi yang sangat tinggi selama akhir pekan. Sekitar setengah dari 74 kota yang dipantau kualitas udaranya menunjukkan polusi parah.

Kemudian Surat kabar Tiongkok *Global Times* mengatakan udara kotor “*mengejutkan penduduk setempat hingga memicu seruan dari publik untuk menggeser model pembangunan negara dari fiksasi sebelumnya pada pertumbuhan ekonomi*”. “*Mari kita melihat dengan jelas pengelolaan pencemaran lingkungan dengan rasa urgensi.*” Otoritas lingkungan kota menyatakan, keluhan tentang polusi udara di ibukota Tiongkok Beijing telah meningkat lebih dari dua kali lipat dalam lima bulan pertama tahun 2014, tanda meningkatnya kemarahan publik tentang biaya pertumbuhan ekonomi yang cepat. Biro Lingkungan Kota Beijing mengungkapkan, tercatat 12.599 pengaduan resmi tentang kabut asap diajukan oleh anggota masyarakat dari Januari hingga Mei 2014, 124 % lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu (Stanway dan Birsell 2014).

Pada Maret 2014, Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang mengatakan kepada sekitar 3000 delegasi legislatif Tiongkok bahwa “*Tiongkok akan melakukan perang melawan polusi sebagaimana kami mendeklarasikan perang*

melawan kemiskinan” (Reuters 2014). Setelah hampir setiap kota di Tiongkok yang dipantau polusinya masih gagal dalam memenuhi standar negara pada tahun 2013. Untuk merespons hal tersebut, pemerintah Tiongkok telah merevisi undang-undang lingkungan pada Januari 2015 yang didalamnya menegaskan akan menghukum perusahaan dan industri yang ditemukan melanggar standar lingkungan. Jika ada perusahaan terbukti melanggar, perusahaan akan disebutkan dan dipermalukan namanya jika melanggar undang-undang perlindungan lingkungan tersebut. Kemudian jika individu yang bertanggung jawab atas perusahaan yang ditemukan melanggar akan menghadapi hukuman 15 hari penjara.

Selain menetapkan undang-undang lingkungan, pemerintah Tiongkok juga merasa perlu menetapkan kebijakan target penanganan polusi udara dan polusi air dalam *China's 13th Five-Year Plan* (2016-2020). Melalui Pidato di depan *China's National People's Congress* (NPC), Perdana Menteri Li Keqiang menyerukan "*pukulan keras*" untuk dilakukan terhadap polusi udara dan air yang telah memakan banyak korban di sebagian besar negara terpadat di dunia. Li menyerukan target untuk meningkatkan standar lingkungan secara keseluruhan, tetapi berfokus secara khusus pada langkah-langkah untuk mengatasi kabut asap perkotaan yang akan menghasilkan pembacaan hari "*good air quality*".

Target tersebut rencananya akan ditetapkan sebagai bagian dari *China's 13th Five-Year Plan* pada tahun 2016-2020, sebuah cetak biru kebijakan yang akan membentuk pembangunan ekonomi Tiongkok selama lima tahun ke depan hingga 2020. Pidato Li telah mengindikasikan bahwa pemerintah akan membatasi emisi pabrik dari partikel kecil yang berbahaya (PM2.5) penyebab utama polusi udara turun sebesar 25%. Terbukti, kebijakan lingkungan dalam *China's 13th Five-Year*

Plan pertama kalinya dalam sejarah Tiongkok menetapkan target PM2.5 secara spesifik. Sasaran utama lainnya yang diungkapkan dalam laporan kerja pemerintah antara lain: Pengurangan emisi dari industri dan kendaraan berbahan bakar batu bara untuk mendukung penggunaan batu bara yang lebih bersih dan lebih efisien; mempromosikan penggunaan listrik dan gas alam sebagai pengganti batu bara; dukungan untuk sektor tenaga angin, surya dan bio; peningkatan proporsi energi bersih; mendorong penggunaan limbah jerami sebagai sumber daya; pengurangan pembakaran di lapangan; dan implementasi langkah-langkah pengendalian untuk menangani polusi udara (Qin 2016).

3.1.2 Tekanan NGO Lingkungan Tiongkok untuk Mencantumkan Kebijakan Adaptasi Iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*

Selain desakan masyarakat melalui media sosial dan desakan dari media Tiongkok, NGO Lingkungan Tiongkok juga merupakan faktor pendorong dimasukkannya kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Tuntutan NGO lingkungan Tiongkok berawal dari kebijakan lingkungan Tiongkok pada *Five Year Plan* periode sebelumnya yakni *China's 12th Five-Year Plan* di era Hu Jintao belum memberikan dampak yang signifikan bagi kondisi lingkungan di Tiongkok. Dalam perjalanannya, pemerintah terdahulu masih dilema antara menyeimbangkan ekonomi atau melindungi lingkungannya yang membutuhkan biaya yang lebih (Ananda 2019).

Dilaporkan oleh *China Dialogue* sebuah *platform* media Beijing yang fokus pada isu lingkungan Tiongkok, pada akhir tahun 2015, target lingkungan pada *China's 12th Five-Year Plan* telah berakhir dan masih menyisakan berbagai tantangan permasalahan lingkungan terutama masalah polusi pada periode

kepemimpinan berikutnya, Tiongkok sebelumnya masih belum mengurangi konsumsi batu bara yang menjadi akar permasalahan buruknya polusi udara di Tiongkok. Sehingga tahun 2016 dan seterusnya akan menjadi perjalanan yang sangat penting dalam menyusun cetak biru berikutnya untuk pembangunan industri, ekonomi, dan sosial Tiongkok. NGO lingkungan Tiongkok menyerukan agar pemerintah Tiongkok selanjutnya, di era Xi Jinping harus mencantumkan kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* (Nan 2014).

Para pegiat lingkungan Tiongkok mengatakan bahwa, cuaca ekstrim di Tiongkok telah membunuh sekitar 2.000 orang per tahun. Menurut laporan *Global Burden of Disease Study* (GBD), polusi udara berkontribusi pada 1,2 juta kematian dini di Tiongkok pada tahun 2010. Hal ini membuat para NGO lingkungan di Tiongkok mendesak pemerintah untuk merumuskan kebijakan lingkungan baru yang fokus terhadap aksi iklim sambil mengikuti prediksi terbaru tentang dampak pemanasan global dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) (China Dialogue 2014).

Beberapa kelompok NGO lingkungan Tiongkok diantaranya *Greenovation Hub* NGO Tiongkok, Pusat Konservasi Shanshui, dan Institut Lingkungan Global telah menyerukan upaya untuk memasukkan kebijakan adaptasi iklim ke dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Kelompok NGO tersebut juga mendesak pemerintah untuk mengesahkan undang-undang perubahan iklim lebih cepat. Komentar para NGO ini muncul setelah laporan IPCC yang diterbitkan pada bulan Maret 2014. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa, perubahan iklim memiliki dampak yang meningkat pada ketahanan pangan, ekosistem, sumber daya air dan ekonomi pesisir dan proses urbanisasi Tiongkok menghadapi berbagai tantangan mendesak.

Tiongkok kemungkinan akan menghadapi masalah seperti meningkatnya kerentanan terhadap pertanian dan ketahanan pangan akibat berkurangnya hasil panen jagung. Kekeringan dan dampak air terkait akan menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi masyarakat dan bisnis. Dan kota-kota besar, seperti Guangzhou, Shanghai, dan Tianjin, akan sangat rentan terhadap banjir pesisir yang dapat berasal dari kenaikan permukaan laut global setinggi 0,5 meter (China Dialogue 2014).

Laporan IPCC tersebut menekankan bahwa Tiongkok masih memiliki kesempatan untuk memilih masa depan untuk mengatasi hal tersebut. Disebutkan bahwa kerugian meningkat dengan pemanasan yang lebih besar, memperkuat urgensi untuk menerapkan langkah-langkah adaptasi secara paralel dengan strategi mitigasi yang mengurangi emisi global dengan segera dan cepat. Selain itu, kelompok NGO yang termasuk dalam kelompok internasional seperti Oxfam, *Greenpeace*, *The Nature Conservancy*, dan *World Wildlife Federation* juga mengeluarkan pernyataan bersama bahwa adaptasi iklim sebelumnya masih terbilang tertinggal dan belum memberikan dampak yang signifikan dalam upaya menangani bencana iklim, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca juga harus ditingkatkan. Meskipun beberapa tahun terakhir telah melihat peluncuran program pembangunan rendah karbon dan pasar karbon, ditambah investasi besar dalam penghematan energi dan teknologi industri baru, implementasi adaptasi iklim tersebut masih terbilang lebih lambat (Nan 2014).

Para NGO tersebut ingin melihat langkah-langkah adaptasi iklim dimasukkan dalam rencana pembangunan regional dan industri. Misalnya, daerah pedesaan yang miskin di mana panen menyusut harus diberikan pasokan makanan yang terjamin. Kelompok ini juga menyerukan "*perencanaan industri dan ekologi*

gabungan untuk daerah yang rentan terhadap lingkungan, dengan rencana untuk dampak iklim dan kemungkinan bencana, manajemen risiko bencana yang lebih baik, dan kemampuan kesadaran dan adaptasi bencana yang lebih baik, serta kesadaran risiko bencana dan kemampuan adaptasi yang lebih baik”.

Atas seruan kelompok NGO lingkungan di Tiongkok telah menggerakkan pemerintah Tiongkok untuk segera merumuskan kebijakan adaptasi iklim yang lebih terperinci dibanding *Five-Year Plan* sebelumnya. Para pemimpin Tiongkok juga telah mengakui meningkatnya risiko perubahan iklim sehingga perlu mengambil tindakan untuk mengubah lintasan emisi Tiongkok. Ini termasuk menetapkan target intensitas karbon, melakukan investasi besar dalam energi bersih, meluncurkan program percontohan perdagangan emisi dan membatasi produksi batu bara di beberapa kota besar di Tiongkok (China Dialogue 2014). Opini publik yang berasal dari masyarakat, NGO lingkungan lokal maupun global terkait masalah lingkungan dan seruan kebijakan mitigasi iklim, telah mempengaruhi pertimbangan pemerintah untuk merumuskan kebijakan dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Pada 17 Maret 2016 *China's 13th Five-Year Plan* telah resmi diterbitkan oleh NDRC, kebijakan yang tertuang di dalamnya memiliki fokus yang kuat untuk mengatasi tantangan lingkungan, dengan target dan langkah-langkah untuk mengatasi beberapa masalah keberlanjutan termasuk perubahan iklim, polusi udara, urbanisasi, dan transportasi.

3.1.3 Pengaruh Ideologi Partai Komunis Tiongkok dan Birokrasi NDRC dalam Penyusunan Target Iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*

Pembangunan merupakan prioritas utama Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam mengatur dan meremajakan negara. Komite partai di semua tingkatan harus

memperdalam pemahaman tentang aturan pembangunan, serta mendorong modernisasi sistem tata kelola nasional dan mendorong pembangunan ekonomi dan sosial dengan lebih baik. Prinsip-prinsip panduan untuk pembangunan Tiongkok selama periode “*China’s 13th Five-Year Plan*” harus didasarkan pada ideologi Partai Komunis Tiongkok. PKT telah mengibarkan panji-panji besar sosialisme dengan karakteristik Tiongkok, menerapkan semangat Sidang Paripurna Ketiga dan Keempat Komite Sentral PKT ke-18 secara menyeluruh, menggunakan pemikiran Marxisme, Leninisme, Pemikiran Mao Zedong, Teori Deng Xiaoping, pemikiran penting dari “*Three Represents*,” dan *Scientific Outlook on Development* sebagai panduan PKT untuk mewujudkan tujuan membangun masyarakat yang cukup makmur sesuai *Chinese dream* dengan mempromosikan pembangunan *green economy* yang berkelanjutan dan menguntungkan (Haacke, n.d.).

PKT mengharapkan *Five-Year Plan* di era Xi Jinping memasukkan kebijakan dengan tetap menekankan tiga indikator penting terkait perubahan iklim yang diperkenalkan oleh pendahulunya: yaitu, pengurangan intensitas energi, pengurangan karbon intensitas, dan peningkatan pangsa energi bersih dalam konsumsi energi secara keseluruhan. Dalam merealisasikan tiga indikator penting tersebut, *National Development and Reform Commission* (NDRC) adalah salah satu badan pembuat kebijakan Tiongkok yang paling kuat di pemerintah pusat dengan tanggung jawab atas semua kebijakan yang akan dicantumkan berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk penulisan *Five-Year Plan* Tiongkok. NDRC disebut juga sebagai entitas birokrasi paling kuat dalam pembuatan kebijakan perubahan iklim di Tiongkok, bahkan jika tidak dalam pembuatan kebijakan domestik Tiongkok secara umum (Haacke, n.d.).

Dalam proses pembuatan kebijakan perubahan iklim untuk *Five-Year Plan*, NDRC dibantu oleh para ahli dari luar birokrasi. Akademisi dan anggota wadah pemikir dan lembaga penelitian yang bersama-sama menghasilkan posisi dan strategi perubahan iklim Tiongkok dengan organ pemerintah. Para pakar ilmiah secara teratur dipanggil untuk memberikan nasihat independen kepada para pemimpin senior. Para ahli dan akademisi tersebut tergabung dalam Komite Penasehat Nasional untuk Perubahan Iklim pemerintah pusat. Komite memiliki peran langsung dalam pengembangan kebijakan, termasuk untuk negosiasi internasional dan rencana lima tahunan. Komite tersebut pada akhirnya akan melaporkan langsung ke NDRC dan Dewan Negara terkait saran-saran kebijakan lingkungan yang perlu dimasukkan dalam *Five-Year Plan* (Hu 2016).

Pemerintah pusat sangat mendukung para pakar dan akademisi tersebut dengan memberikan pendanaan untuk penelitian terkait perubahan iklim, dan telah menciptakan komunitas peneliti muda yang memiliki koneksi baik yang siap untuk menggantikan generasi pakar berpengaruh saat ini. Mengembangkan hubungan dengan generasi pakar baru ini akan menjadi salah satu cara untuk membentuk pembuatan kebijakan Tiongkok tentang perubahan iklim di masa depan. Namun demikian, meskipun semua ahli ini berpengaruh, mereka tetap hanya penasihat; pemerintah masih akan memutuskan apakah akan bertindak atas saran para ahli tersebut (Henderson and Joffe 2016).

China's 13th Five-Year Plan disusun mulai dari tahun 2014 oleh gugus tugas yang bertanggung jawab kepada NDRC. Kebijakan lingkungan yang dimasukkan dalam *China's 13th Five-Year Plan* adalah berdasarkan penelitian ilmiah dari pakar lingkungan Tiongkok yang hasil akhirnya nanti akan dilaporkan langsung kepada NDRC untuk dirumuskan menjadi sebuah kebijakan dalam

China's 13th Five-Year Plan. Pada tahun 2015, konsultasi ekstensif dilakukan sebelum rapat pleno PKT ke-5, yang menyetujui proposal formal. Rancangan tersebut kemudian dibahas dan disetujui oleh *State Council* dan rencana akhir diadopsi pada bulan Maret 2016 oleh *Chinese People's National Assembly*. Kebijakan dalam *China's 13th Five-Year Plan* telah menetapkan target untuk mengurangi intensitas karbon dioksida Tiongkok sebesar 18% dan mengurangi intensitas energinya sebesar 15% selama lima tahun kedepan (2016-2020) lebih jelas (lihat gambar 3 hal. 32).

Kebijakan *China's 13th Five-Year Plan* terkait perubahan iklim, energi, dan lingkungan Tiongkok yang telah diresmikan nantinya akan diterapkan melalui sistem tanggung jawab target yang mengalir. Pemerintah pusat menetapkan target keseluruhan, yang terpenting dituangkan dalam *Five-Year Plan*. Kemudian target tersebut nantinya dipilah ke masing-masing provinsi di Tiongkok untuk menjalankan implementasinya. Proses pemilahan target secara teoritis merupakan keputusan pemerintah pusat berdasarkan pemodelan dari para ahli. Pemerintah provinsi juga bebas memilih mekanisme kebijakan yang akan digunakan untuk mengimplementasikan sebuah target. Pemerintah pusat pada akhirnya akan mengevaluasi kinerja para pemimpin provinsi berdasarkan kemampuan masing-masing dalam mencapai target di berbagai bidang kebijakan. Dengan demikian, kesuksesan pemimpin provinsi ditentukan sesuai dengan kinerja baiknya dalam mencapai target *Five-Year Plan* (Haacke, n.d.).

3.2 Faktor Konteks Internasional

3.2.2 Kepatuhan Tiongkok dalam Perjanjian Multilateral UNFCCC dan Kerja Sama Bilateral tentang Perubahan Iklim antara AS-Tiongkok

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) diadopsi pada KTT *Rio Earth* pada tahun 1992. Lebih dari 190 negara yang meratifikasi konvensi disebut sebagai Para Pihak Konvensi. UNFCCC adalah perjanjian multilateral utama dunia tentang perubahan iklim. Tiongkok meratifikasi UNFCCC pada tahun 1993 dan telah berpartisipasi dalam semua *Conference of Parties (COP)* tahunan UNFCCC dan banyak pertemuan terkait, dengan delegasi dan peran yang terus berkembang (Center on Global Energy Policy, n.d.).

Dalam negosiasi di bawah UNFCCC, Tiongkok telah menjadi advokat yang kuat untuk prinsip “*common but differentiated responsibilities*.” Berdasarkan prinsip tersebut, yang diatur dalam Pasal 3.1 Konvensi, semua negara bertanggung jawab untuk memberikan kontribusi terhadap solusi perubahan iklim, tetapi sifat dan cakupan tanggung jawab tersebut berbeda-beda. Tiongkok juga menganjurkan menganjurkan untuk:

- a. Fleksibilitas untuk negara berkembang dalam berbagai topik, termasuk pemantauan, pelaporan dan verifikasi emisi.
- b. Dukungan keuangan dan teknis dari negara maju ke negara berkembang untuk membantu pengurangan emisi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
- c. Prioritas perhatian pada kebutuhan adaptasi negara-negara berkembang.

Sebelum konferensi Kopenhagen tahun 2009 (COP-15), Tiongkok pertama kalinya menyatakan komitmen internasional untuk membatasi emisi CO₂. Tiongkok berjanji untuk mengurangi emisi CO₂ per unit PDB sebesar 40%-45% dari tingkat tahun 2005 pada tahun 2020. Tiongkok juga berjanji untuk

meningkatkan porsi bahan bakar non-fosil dalam konsumsi energi primer menjadi 15% dan meningkatkan tutupan hutan seluas 40 juta hektar dari tingkat tahun 2005, keduanya pada tahun 2020. Perdana Menteri Wen Jiabao melakukan perjalanan ke Kopenhagen, di mana dia bertemu dengan beberapa kepala negara di jam-jam terakhir konferensi yang dramatis. Konferensi Kopenhagen secara luas dianggap gagal, dan semua penghasil emisi utama, termasuk Tiongkok, menerima banyak kritik atas hasil pertemuan tersebut.

Pada tahun-tahun setelah konferensi Kopenhagen, para pemimpin Tiongkok semakin mencari titik temu tentang perubahan iklim dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Pada tahun 2014, Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden AS Barack Obama membuat pengumuman bersama yang bersejarah tentang perubahan iklim, mengumumkan tujuan emisi domestik dan rencana untuk bekerja sama menuju kesepakatan iklim global yang baru pada Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21 di Paris pada bulan Desember 2015. Pengumuman bersama menandai titik balik dalam negosiasi iklim global, dengan para pemimpin dari dua penghasil emisi terbesar dunia negara maju dan berkembang terbesar berjanji untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan global (Center on Global Energy Policy, n.d.).

Keseriusan terkait tantangan masalah perubahan iklim menuntut kedua belah pihak penyumbang emisi global ini untuk bekerja sama secara konstruktif demi kebaikan bersama. Pada penemuan bersejarah tahun 2014 tersebut, Barack Obama dan Presiden Xi Jinping menegaskan kembali pentingnya memperkuat kerja sama bilateral mengenai perubahan iklim dan akan bekerja sama dengan negara lain untuk mengadopsi protokol, instrumen hukum lain, atau hasil yang disepakati dengan kekuatan hukum di bawah Konvensi yang berlaku untuk semua

Pihak pada Konferensi Iklim PBB di Paris pada tahun 2015. Kedua negara tersebut berkomitmen untuk mencapai kesepakatan tahun 2015 yang ambisius yang mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama namun berbeda dan kemampuan masing-masing, mengingat keadaan nasional yang berbeda (The White House 2014).

Barack Obama dan Xi Jinping telah mengumumkan tindakan masing-masing terkait perubahan iklim pasca-2020, menyadari bahwa tindakan ini adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk beralih ke ekonomi rendah karbon, mengingat sasaran suhu global 2°C. Amerika Serikat bermaksud untuk mencapai target ekonomi luas untuk mengurangi emisinya sebesar 26%-28% di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2025 dan melakukan upaya terbaik untuk mengurangi emisinya sebesar 28%. Kemudian Tiongkok bermaksud untuk mencapai puncak emisi CO₂ sekitar tahun 2030 dan melakukan upaya terbaik untuk mencapai puncaknya lebih awal dan bermaksud untuk meningkatkan pangsa bahan bakar non-fosil dalam konsumsi energi primer menjadi sekitar 20% pada tahun 2030. Kedua belah pihak bermaksud untuk terus bekerja untuk meningkatkan ambisi dari waktu ke waktu (Taylor and Branigan 2014).

Amerika Serikat dan Tiongkok berharap bahwa dengan mengumumkan target-target tersebut, keduanya dapat menyuntikkan momentum ke dalam negosiasi iklim global dan menginspirasi negara-negara lain untuk bergabung dalam tindakan ambisius secepat mungkin, sebaiknya pada kuartal pertama tahun 2015. Kedua Presiden memutuskan untuk bekerja sama secara erat selama tahun depan untuk mengatasi hambatan besar dalam mencapai kesepakatan iklim global yang berhasil di Paris. Komunitas ilmiah global telah memperjelas bahwa aktivitas manusia telah mengubah sistem iklim dunia. Percepatan perubahan iklim

telah menimbulkan dampak serius. Suhu yang lebih tinggi dan peristiwa cuaca ekstrem merusak produksi pangan, naiknya permukaan laut, dan badai yang lebih merusak membuat kota-kota pesisir kita semakin berisiko dan dampak perubahan iklim telah merugikan ekonomi di seluruh dunia, termasuk ekonomi Amerika Serikat dan Tiongkok. Perkembangan ini sangat membutuhkan tindakan yang ditingkatkan untuk mengatasi tantangan tersebut (Landler 2014).

Pada saat yang sama, bukti ekonomi semakin memperjelas bahwa tindakan cerdas terhadap perubahan iklim sekarang dapat mendorong inovasi, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan membawa manfaat luas mulai dari pembangunan berkelanjutan hingga peningkatan ketahanan energi, peningkatan kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup yang lebih baik. Mengatasi perubahan iklim juga akan memperkuat keamanan nasional dan internasional. Inovasi teknologi sangat penting untuk mengurangi biaya teknologi mitigasi saat ini, yang mengarah pada penemuan dan penyebaran teknologi baru nol dan rendah karbon serta meningkatkan kapasitas negara untuk mengurangi emisinya. Amerika Serikat dan Tiongkok adalah dua investor terbesar di dunia dalam energi bersih dan sudah memiliki program kerja sama teknologi energi yang kuat. Kedua belah pihak memiliki, antara lain:

- a. Membentuk *The US-China Climate Change Working Group* (CCWG). Keduanya telah meluncurkan inisiatif aksi pada kendaraan, jaringan pintar, penangkapan karbon, pemanfaatan dan penyimpanan, efisiensi energi, manajemen data gas rumah kaca, hutan dan boiler industri. Kemudian setuju untuk bekerja sama menuju penurunan fase global hidrofluorokarbon (HFC), gas rumah kaca yang sangat kuat.

- b. Menciptakan Pusat Penelitian Energi Bersih Amerika Serikat-Tiongkok, yang memfasilitasi kerja kolaboratif dalam teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon, efisiensi energi di gedung, dan kendaraan bersih.
- c. Menyepakati tinjauan sejawat bersama atas subsidi bahan bakar fosil yang tidak efisien di bawah G-20 (The White House 2014).

Amerika Serikat dan Tiongkok berniat untuk terus memperkuat dialog kebijakan dan kerja sama praktis, termasuk kerja sama dalam teknologi batu bara canggih, energi nuklir, shale gas, dan energi terbarukan, yang akan membantu mengoptimalkan bauran energi dan mengurangi emisi, termasuk dari batu bara, di kedua negara (Landler 2014). Untuk lebih mendukung pencapaian tujuan iklim yang ambisius, pada November 2014 kedua belah pihak telah mengumumkan langkah-langkah tambahan untuk memperkuat dan memperluas kerja sama keduanya, dengan menggunakan sarana yang ada, khususnya *The US-China Climate Change Working Group* (CCWG), Pusat Penelitian Energi Bersih AS-Tiongkok, dan *US-China Economic and Strategic Dialogue*. Ini termasuk:

- a. Memperluas Penelitian dan Pengembangan Energi Bersih Bersama: Komitmen baru untuk pusat penelitian energi bersih Amerika Serikat-Tiongkok, termasuk melanjutkan pendanaan untuk tiga jalur yang ada pada efisiensi bangunan, kendaraan bersih, dan teknologi batu bara canggih serta meluncurkan jalur baru pada hubungan energi-air.
- b. Memajukan Demonstrasi Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon Utama: Pembentukan proyek penyimpanan karbon besar baru yang berbasis di Tiongkok melalui konsorsium publik-swasta internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Tiongkok untuk secara intensif

mempelajari dan memantau penyimpanan karbon menggunakan CO₂ industri dan juga bekerja sama dalam proyek percontohan *Enhanced Water Recovery* (EWR) baru untuk menghasilkan air bersih dari injeksi CO₂ ke akuifer.

- c. Meningkatkan Kerja Sama *Hidrofluorokarbon* (HFC): Berdasarkan perjanjian Sunnylands yang bersejarah antara Presiden Obama dan Presiden Xi mengenai HFC, gas rumah kaca yang sangat berpotensi, kedua pihak akan meningkatkan kerja sama bilateral untuk mulai menghentikan secara bertahap penggunaan HFC dengan potensi pemanasan global yang tinggi dan bekerja sama dalam konteks multilateral sebagaimana disepakati oleh kedua Presiden pada pertemuan mereka di St. Petersburg pada 6 September 2013.
- d. Meluncurkan Inisiatif Kota Cerdas Iklim/Rendah Karbon: Menanggapi pertumbuhan urbanisasi dan emisi gas rumah kaca yang semakin signifikan dari kota-kota dan mengakui potensi para pemimpin lokal untuk melakukan aksi iklim yang signifikan, Amerika Serikat dan Tiongkok akan membentuk inisiatif baru tentang Iklim-Kota Cerdas/Rendah Karbon di bawah CCWG. Sebagai langkah pertama, Amerika Serikat dan Tiongkok akan mengadakan KTT Kota Cerdas Iklim/Rendah Karbon di mana kota-kota terkemuka dari kedua negara akan berbagi praktik terbaik, menetapkan tujuan baru, dan merayakan kepemimpinan tingkat kota dalam mengurangi emisi karbon dan membangun ketahanan.
- e. Mempromosikan Perdagangan Barang Hijau: Mendorong perdagangan bilateral barang lingkungan berkelanjutan dan teknologi energi bersih, termasuk melalui misi perdagangan Amerika Serikat yang dipimpin oleh

Sekretaris Moniz dan Pritzker pada April 2015 yang akan berfokus pada kota pintar rendah karbon dan teknologi pertumbuhan rendah karbon pintar.

- f. Mendemonstrasikan Energi Bersih di Lapangan: Program percontohan tambahan, studi kelayakan, dan proyek kolaboratif lainnya di bidang efisiensi bangunan, efisiensi boiler, energi surya, dan jaringan cerdas (The White House 2014).

Pengumuman bersama antara Amerika Serikat dan Tiongkok merupakan puncak dari dialog bilateral selama berbulan-bulan, menyoroti peran penting yang harus dimainkan oleh kedua negara dalam mengatasi perubahan iklim. Tindakan yang mereka umumkan adalah bagian dari upaya jangka panjang untuk mencapai dekarbonisasi ekonomi global yang mendalam dari waktu ke waktu. Tindakan ini juga akan menyuntikkan momentum ke dalam negosiasi iklim global untuk mencapai kesepakatan iklim baru yang sukses tahun depan di Paris (Taylor and Branigan 2014). Sebagai upaya yang membuktikan komitmen Tiongkok dalam perjanjian UNFCCC serta komitmen kerja sama bilateral AS-Tiongkok untuk menurunkan tingkat emisi domestik dalam memerangi perubahan iklim, *Five-Year Plan* pertama di era Xi Jinping yakni *China's 13th Five-Year Plan*, Tiongkok menetapkan target untuk memajukan peradaban ekologis dan mempromosikan pembangunan hijau, rendah karbon, tahan iklim, dan berkelanjutan. *China's 13th Five-Year Plan* (2016-2020) yang diterbitkan pada 17 Maret 2016 telah menetapkan target untuk menurunkan karbon dioksida per unit PDB dan konsumsi energi per unit PDB masing-masing sebesar 18% dan 15%, meningkatkan pangsa bahan bakar non-fosil dalam konsumsi energi primer

menjadi 15% dan meningkatkan volume stok hutan sebesar 1,4 miliar meter kubik, sebagai langkah konkrit dan penting untuk mengimplementasikan kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Tiongkok akan melanjutkan upayanya untuk meningkatkan efisiensi energi di industri, transportasi dan bangunan, mempromosikan pengiriman energi ramah lingkungan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan, mulai tahun 2017 sistem perdagangan emisi nasionalnya dan secara bertahap menurunkan produksi dan konsumsi batu bara (The White House 2016).

3.3 Faktor Kondisi Ekonomi dan Militer

3.3.1 Perubahan Iklim Dianggap sebagai Ancaman Keamanan Nasional Holistik Tiongkok

Sebagai salah satu negara penyumbang emisi terbesar dunia, Tiongkok telah menghadapi masalah yang berindikasi terhadap keamanan ekonomi dan militer. Pendekatan Tiongkok terhadap pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan telah menciptakan banyak ancaman keamanan terkait perubahan iklim. Karena polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil yang tidak diatur di banyak kota di Tiongkok telah menyebabkan orang yang tinggal di Tiongkok merasa tidak aman. Hal ini menimbulkan masalah kesehatan bagi warga negara maupun non-warga di wilayah tersebut, karena 16 dari 20 kota paling tercemar berada di Tiongkok. Tiongkok kehilangan modal manusia dan keuangan, kerugian yang menggarisbawahi kerentanan negara terhadap ancaman eksternal. Banyak kota besar Tiongkok sangat rentan terhadap perubahan iklim dan bencana terkait iklim seperti banjir dan penggurunan, memaksa orang untuk bermigrasi ke kota perkotaan yang padat penduduk (China Dialogue 2014).

Penelitian (Mochizuki dan Zhang 2011) menjelaskan bahwa pemerintah Tiongkok pada awalnya enggan menerima perubahan iklim sebagai keharusan keamanan nasional. Namun, pembentukan Komisi Pakar Perubahan Iklim Militer dengan *Chinese People's Liberation Army* (PLA) menunjukkan bahwa pemerintah Tiongkok mulai melihat perubahan iklim sebagai ancaman keamanan nasional yang nyata. Tiongkok pertama kali mengakui perubahan iklim dalam Komunikasi Nasional Awal tentang Perubahan Iklim pada tahun 2004. Dalam satu dekade sejak itu, Tiongkok telah membuat langkah signifikan dalam mengatasi perubahan iklim dengan mengeluarkan Komunikasi Nasional Kedua tentang Perubahan Iklim pada tahun 2008, memberikan data dari ilmuwan kepada IPCC, dan menggabungkan serta mengimplementasikan berbagai inisiatif perubahan iklim di seluruh negeri (China Dialogue 2014).

Target penurunan emisi di Tiongkok sebagai strategi revolusi asumsi dan target pembangunan ekonomi dan sosial jangka panjang *Chinese dream*. Strategi *Chinese dream* ini sebagai pengembangan impian yang diusulkan pada tahun 2012 oleh Sekretaris Jenderal Xi Jinping yang menyatakan bahwa target pembangunan Tiongkok untuk menjadi lebih modern yang makmur, kuat, demokratis, maju secara budaya, dan harmonis yang ingin dicapai. (Ji-Feng, Zhong-Yu, Ya-Xiong, & Zhi-Chao, 2018). Naiknya Xi Jinping ke tampuk kekuasaan memperkuat penekanan Hu Jintao pada masyarakat yang harmonis dan peradaban ekologis. Dalam pemikiran Xi, tugas membangun peradaban ekologis merupakan landasan dari *Chinese dream*. *Chinese dream* yaitu mimpi membangun Tiongkok menjadi masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh dan mimpi untuk menunjukkan kepada dunia komitmen Tiongkok untuk memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perdamaian dan perkembangan umat manusia. Untuk mewujudkan *Chinese*

dream, Xi Jinping berfokus pada pembangunan berkelanjutan dan memperluas kekuatan produktif, dan telah melakukan segala upaya untuk mengarahkan pembangunan Tiongkok menuju kualitas dan efisiensi yang lebih tinggi, serta pemerataan, keberlanjutan, dan keamanan yang lebih besar (Hu 2016).

Sejak era Hu Jintao, *China's 12th Five-Year* (2011-2015) telah memiliki aksi pembangunan hijau yang memiliki tujuh target utama tahun 2015 adalah pengurangan emisi polutan, peningkatan sumber dan kualitas air minum, pengendalian pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya dan limbah berbahaya, meningkatkan operasi infrastruktur lingkungan perkotaan, membalikkan kerusakan ekologis, meningkatkan keselamatan nuklir, dan meningkatkan kelembagaan pengaturan lingkungan. Sasaran lingkungan termasuk mengurangi emisi karbon per unit PDB sebesar 17% dan konsumsi energi per unit PDB sebesar 16%, serta meningkatkan tutupan hutan hingga 21,66%. Namun dalam implementasi target-target *China's 12th Five-Year*, dalam perjalanan pemerintah Hu Jintao masih belum memberikan dampak signifikan dalam upaya penurunan emisi karbon di Tiongkok. Hal ini dikarenakan pemerintah Hu Jintao masih dilema antara ingin menyeimbangkan perekonomian atau menangani masalah lingkungan yang membutuhkan biaya yang lebih, dan Tiongkok masih tetap meningkatkan produksi batu bara (OECD, n.d.).

Presiden Xi telah mengambil alih kepemimpinan dengan membuat rencana dan mendukung upaya untuk membangun masyarakat yang cukup sejahtera dalam segala hal. Pada tahun 2013, melalui pertemuan pertama Komisi Keamanan Nasional Pusat PKT, Xi mengumumkan “Pandangan Keamanan Nasional Holistik” baru Tiongkok, yang merupakan tulang punggung keamanan nasional Tiongkok saat ini dan mengidentifikasi 11 bidang prioritas dalam keamanan

nasional. Keberlanjutan ini meliputi: keamanan politik, keamanan tanah air, keamanan militer, keamanan ekonomi, keamanan budaya, keamanan masyarakat, keamanan iptek, keamanan informasi, keamanan ekologis, keamanan sumber daya, dan keamanan nuklir. Selanjutnya, Tiongkok menerbitkan "Buku Biru tentang Keamanan Nasional" pada tahun 2014, dan ditetapkan sebagai buku biru pertama negara tentang keamanan nasional. Fitur penting dari buku ini adalah bagaimana buku ini memperluas cakupan keamanan nasional untuk memasukkan masalah lingkungan sebagai tema yang menentukan (Lampton 2015).

Untuk merespons bahaya iklim bagi sektor perekonomiannya di masa depan, di era Xi Jinping, *China's 13th Five-Year* pertama kalinya mencantumkan kebijakan iklim yang memfokuskan pada pembangunan perekonomian berkelanjutan untuk mengurangi dampak buruk iklim. Hal ini sebagai respons terhadap kelemahan dalam model pertumbuhan ekonomi lama, yang sangat berorientasi ekspor, dengan struktur industri yang tidak menguntungkan dan kapasitas inovasi serta standar efisiensi yang rendah (Naughton, 2014). Beralih ke model pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan telah menjadi perhatian utama pemerintah Tiongkok, dan konsep ekonomi rendah karbon mengandung elemen penting dari model yang lebih menjanjikan bagi elit partai, seperti juga menawarkan pengakuan simbolis internasional.

Dalam hal keamanan militer, ekonomi diharapkan terus mengalami pertumbuhan untuk mendukung kemakmuran yang moderat dalam segala hal. Prioritas pembangunan ekonomi Tiongkok akan mendukung prioritas peningkatan kekuatan militer Tiongkok. Xi Jinping memiliki prioritas keamanan nasional holistik termasuk memperhatikan keamanan militer dengan berfokus pada penguatan *People's Liberation Army* (PLA) sebagai sebuah kekuatan,

menggarisbawahi tema kekuasaan partai atas militer, meningkatkan kemampuan militer, dan meningkatkan profesionalisme militer. Xi juga telah memperluas ruang lingkup dan ambisi modernisasi PLA, dengan jelas menegaskan peran luar negeri PLA dan menyediakan kerangka kelembagaan untuk memungkinkan pertumbuhan militer yang substansial di luar ancaman keamanan tradisional PLA.

Pendekatan Tiongkok untuk mendanai persyaratan keamanan telah disengaja dan substansial. Pengeluaran militer Tiongkok meningkat rata-rata 10% (d disesuaikan dengan inflasi) per tahun dari tahun 2000 hingga 2016 dan secara bertahap melambat menjadi pertumbuhan 5% hingga 7% selama dua tahun terakhir (2014-2015). Pengeluaran militer Tiongkok telah meningkat sejak tahun 1990-an, ketika Tiongkok secara resmi mulai menekankan ukuran program terkait pertahanan selama beberapa "*Five-Year Plan*". Dorongan Tiongkok untuk memperluas integrasi sipil-militer dan aktivitas ekonomi internasional mendukung tujuan ini.

Oleh karena itu, di era Xi Jinping, *China's 13th Five-Year Plan* memiliki fokus dalam memajukan peradaban ekologis dan mempromosikan pembangunan hijau, rendah karbon, tahan iklim, dan berkelanjutan. Tiongkok telah menetapkan target PDB tidak boleh kurang dari 6,5% pada 2020. Peningkatan ekonomi diharapkan terus bertumbuh untuk mempertahankan posisi Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, dan keuntungan perekonomiannya diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kekuatan militer Tiongkok sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan *Chinese dream* yaitu untuk menciptakan masyarakat makmur di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKT).

BAB IV

PENUTUP

2.1 Kesimpulan

Perekonomian Tiongkok telah memasuki fase pertumbuhan yang stabil selama *China's 12th Five-Year* di era Hu Jintao. Namun secara bersamaan, laju kontribusi emisi CO₂ juga semakin tinggi akibat pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Emisi CO₂ tersebut didominasi oleh penggunaan batu bara berlebihan di negaranya. Pasca pemerintahan Hu, Tiongkok masih menyisakan masalah-masalah lingkungan yang begitu kompleks untuk pemerintahan selanjutnya. Masalah yang paling krusial adalah masalah polusi yang telah menewaskan jutaan orang di Tiongkok. Oleh karena itu, di era Xi Jinping, Tiongkok merasa memiliki signifikansi yang besar dan posisi yang penting dalam penyelesaian permasalahan lingkungan terutama mengenai masalah polusi yang dikhawatirkan dapat mempercepat terjadinya perubahan iklim.

Salah satu upaya lingkungan Tiongkok untuk pertama kalinya dalam sejarah *Five-Year Plan* Tiongkok, pemerintah memasukkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Dimasukkannya kebijakan iklim terkait pembatasan penggunaan batu bara dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Dikeluarkannya kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* disebabkan oleh tiga faktor. Faktor-faktor tersebut dilandasi oleh pemikiran William D. Coplin yaitu teori *decision making*. Dalam teorinya, Coplin mengatakan ada tiga faktor yang menyebabkan suatu negara mengeluarkan suatu kebijakan dalam orientasi politik luar negerinya, yaitu faktor politik domestik, konteks internasional, dan faktor kondisi ekonomi dan militer.

Pada faktor domestik, pemerintah didorong untuk merumuskan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* karena pengaruh dari beberapa kelompok kepentingan seperti tekanan dari masyarakat melalui media sosial dan media Tiongkok terkait masalah lingkungan Tiongkok yang memburuk. Ketidakpuasan publik yang berkembang dengan kondisi lingkungan negara yang memburuk telah dipercepat oleh tantangan masalah polusi yang paling terlihat, yaitu polusi udara dan polusi air. Kemudian pengaruh NGO lingkungan Tiongkok yang menekan pemerintah selanjutnya, di era Xi Jinping untuk memasukan kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Tekanan ini merespon hasil implementasi periode *China's 12th Five-Year Plan* di era Hu Jintao masih belum memberikan dampak signifikan dalam penurunan emisi karbon di Tiongkok sehingga penting untuk pemerintah selanjutnya dalam menetapkan target iklim yang lebih terperinci.

Selain itu, yang paling mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan* adalah karena pengaruh ideologi Partai Komunis Tiongkok yang memiliki prioritas pembangunan ekonomi dengan tetap menekankan tiga indikator penting terkait perubahan iklim yang diperkenalkan oleh pendahulunya: yaitu, pengurangan intensitas energi, pengurangan karbon intensitas, dan peningkatan pangsa energi bersih dalam konsumsi energi secara keseluruhan. Kemudian *National Development and Reform Commission* (NDRC) sebagai birokrasi pembuat kebijakan iklim paling kuat di pemerintah pusat nantinya akan bertanggung jawab atas semua kebijakan yang dicantumkan berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan sosial, termasuk penulisan kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* yang dibantu oleh para ilmuwan Tiongkok berdasarkan ideologi kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

Kemudian pada faktor konteks internasional, alasan dimasukkannya kebijakan iklim dalam *Five-Year Plan* Tiongkok juga didorong oleh kepatuhan Tiongkok pada UNFCCC. Tiongkok telah meratifikasi UNFCCC sejak tahun 1993 dan telah berpartisipasi dalam semua *Conference of Parties (COP)* tahunan UNFCCC. Pada tahun 2014, Presiden Xi Jinping dan Presiden AS Barack Obama membuat pengumuman bersama yang bersejarah tentang perubahan iklim, mengumumkan tujuan emisi domestik dan rencana untuk bekerja sama menuju kesepakatan iklim global yang baru pada Konferensi Para Pihak UNFCCC ke-21 di Paris pada bulan Desember 2015. Pengumuman bersama menandai titik balik dalam negosiasi iklim global, dengan para pemimpin dari dua penghasil emisi terbesar dunia negara maju dan berkembang terbesar berjanji untuk bekerja sama untuk mencapai kesepakatan global.

Terakhir, faktor kondisi ekonomi dan militer juga menjadi pendorong dimasukkannya kebijakan adaptasi iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Pemerintah Tiongkok mulai menyadari bahwa perubahan iklim merupakan ancaman bagi keamanan nasional holistik Tiongkok termasuk keamanan ekonomi dan militer. Sehingga untuk menghindari hal tersebut, Tiongkok perlu mereformasi pembangunan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan. Peningkatan ekonomi diharapkan terus bertumbuh untuk mempertahankan posisi Tiongkok sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia, dan keuntungan perekonomiannya juga diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan posisi kekuatan militer Tiongkok sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer terkuat di dunia. Hal ini juga sejalan dengan *Chinese dream* yaitu untuk menciptakan masyarakat makmur di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok.

2.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Analisis *China's 13th Five-Year Plan* dan Politik Luar Negeri Tiongkok dalam Penanganan Perubahan Iklim, penulis merasa bahwa masih banyak hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini. Sehingga penulis akan memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan berguna bagi penelitian selanjutnya:

1. Jika penelitian ini penulis mengambil fokus pada alasan dikeluarkannya kebijakan luar negeri Tiongkok dalam penanganan perubahan iklim dalam *China's 13th Five-Year Plan*, penelitian selanjutnya bisa berfokus pada periode *China's 14th Five-Year Plan* mengingat masalah polusi lingkungan di Tiongkok masih merupakan hal yang masif, tentunya diperlukan upaya-upaya berkelanjutan agar permasalahan tersebut bisa dikendalikan.
2. Penulis juga merekomendasikan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan topik dan teori yang berbeda namun tetap memiliki *concern* pada kebijakan iklim yang tertuang dalam *China's 13th Five-Year Plan*. Judulnya yaitu 'Analisis Implementasi Kebijakan Perubahan Iklim Tiongkok dalam *Framework 13th Five-Year Plan* Ditinjau dari Perspektif *Green Theory*'. Topik ini menarik juga untuk melihat bagaimana upaya Tiongkok dalam mengimplementasikan kebijakan iklim yang tertuang dalam *13th Five-Year Plan*.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden, Nate, and Li Lou. 2014. "China's "New Long March" Through the UN Climate Summit: Context and Opportunities." World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/chinas-new-long-march-through-un-climate-summit-context-and-opportunities>.
- Ananda, Riski. 2019. "Dampak Kebijakan Keamanan Lingkungan Tiongkok terhadap Kondisi Ekonomi Politik Mongolia Tahun 2013-2015." *Jurnal Unri* Vol.6 Edisi II (Desember): 1-14. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/viewFile/24977/24193>.
- Balk, Deborah, and dll. 2011. "Mapping urban settlements and the risks of climate change in Africa, Asia and South America." *International Institute for Environment and Development*, (Januari), 1-15. <https://www.iied.org/g02650>.
- BBC News Indonesia. 2016. "Parlemen Cina ratifikasi Traktat Iklim Paris." BBC. https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2016/09/160902_dunia_iklim_cina_ratifikasi.
- Bing, Kang. 2020. "Complaints about Environment will Prompt Govt to Build Greener China." *China Daily*. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202009/22/WS5f693a7aa31024ad0ba7ae3d.html>.
- Blanchard, Ben, and Michael Martina. 2016. "China's 2016 Defense Budget to Slow in Line with Economy." Reuters. <https://www.reuters.com/article/china-parliament-defence-idUSKCN0W60A5>.
- Center on Global Energy Policy. n.d. "Short History of Chinese Climate Policies." Guide to Chinese Climate Policy. <https://chineseclimatepolicy.energypolicy.columbia.edu/en/short-history-chinese-climate-policies>.
- Center on Global Energy Policy. n.d. "UNFCCC Guide to Chinese Climate Policy." Guide to Chinese Climate Policy. <https://chineseclimatepolicy.energypolicy.columbia.edu/en/unfccc>.

- China Dialogue. 2014. "The global reaction to the latest IPCC climate report: what it means for China and the world." China Dialogue. <https://chinadialogue.net/en/climate/6865-the-global-reaction-to-the-latest-ipcc-climate-report-what-it-means-for-china-and-the-world/>.
- China Dialogue. 2016. "Climate, Energy and China's 13th Five Year Plan in Graphics." China Dialogue. <https://chinadialogue.net/en/climate/8734-climate-energy-and-china-s-13th-five-year-plan-in-graphics/>.
- China Power. 2016. "How Is China's Energy Footprint Changing?" China Power Project. <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/>.
- China Water Risk. 2015. "2014 State of Environment Report Review." China Water Risk. <https://www.chinawaterrisk.org/resources/analysis-reviews/2014-state-of-environment-report-review/>.
- Chotimah, Hidayat C. 2017. "Analisis Strategi Keamanan Energi dalam Upaya Penurunan Emisi Karbon melalui Pendekatan Konstruktivisme." *Jurnal Politik Internasional* Vol.19 No.1:1-10. <https://doi.org/10.7454/global.v19i1.145>.
- Climate Change Laws of the World. 2016. "13th Five-Year Plan China." Climate Change Laws of the World. <https://www.climate-laws.org/geographies/china/policies/13th-five-year-plan>.
- CNN Indonesia. 2016. "Penggunaan Batu Bara di China Turun 3,7 Persen." CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160229145141-85-114287/penggunaan-batu-bara-di-china-turun-37-persen>.
- Coplin, William D., Harry Suryana, and Marsedes Marbun. n.d. *Pengantar Politik Internasional suatu Telaah Teoritis*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. <http://opac-perpusbhghatta.perpusnas.go.id/detail-opac?id=1703>.
- Crewell, John W. 1999. "Mixed-Method Research: Introduction and Application." *Academic Press In the Handbook of Educational Policy*. <https://doi.org/10.1016/B978-012174698-8/50045-X>.

- Databoks. 2016. "Cina dan Amerika, Penghasil Emisi Karbon Terbesar Dunia." Databoks.
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/14/cina-dan-amerika-penghasil-emisi-karbon-terbesar-dunia>.
- Dick, Wilson V. 2015. "Why Climate Change Could be China's Biggest Security Threat." The Diplomat.
<https://thediplomat.com/2015/08/why-climate-change-could-be-chinas-biggest-security-threat/>.
- Dominguez, Gabriel. 2015. "The Cost of Pollution." DW.
https://www-dw-com.translate.google.com/en/how-much-is-pollution-costing-chinas-economy/a-18323476?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.
- Duggan, Jennifer. 2013. "Kunming Pollution Protest is Tip of Rising Chinese Environmental Activism." The Guardian.
<https://amp.theguardian.com/environment/chinas-choice/2013/may/16/kunming-pollution-protest-chinese-environmental-activism>.
- Embassy of the People's Republic of China. 2021. "Xiplomacy: Xi on China's Pursuit of High Quality Development." Xiplomacy: Xi on China's pursuit of high-quality development.
http://ca.china-embassy.gov.cn/eng/zgxw/202103/t20210305_10316064.htm.
- Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Zimbabwe. 2021. "China's Epic Journey from Poverty to Prosperity." China Embassy.
https://zw-china--embassy-gov-cn.translate.google.com/eng/zgjj/202112/t202112_16_10470543.htm?_x_tr_sch=http&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc.
- The Guardian. 2014. "China Pollution Levels hit 20 Times Safe Limit Pollution." The Guardian.
<https://www.theguardian.com/environment/2014/oct/10/china-pollution-levels-hit-20-times-safe-levels>.
- Gusman, Dori, and Tri J. Waluyo. 2015. "Peran Greenpeace dalam Penanganan Kerusakan Lingkungan (Polusi Udara dan Air) di China." *Jurnal Transnasional* Vol.6, No.2 (Februari): 3-13.

<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/2708/2656>.

Haacke, Owen. n.d. "Official 13th Five Year Plan Outline Released." The US-China Business Council. <https://www.uschina.org/policy/official-13th-five-year-plan-outline-release>.

Haacke, Owen. n.d. "The US-China Business Council." NDRC Mempersiapkan Rencana Lima Tahun Ke Depan, Berfokus pada Kualitas daripada Kuantitas. https://www.uschina-org.translate.goog/ndrc-prepares-next-five-year-plan-focuses-quality-over-quantity? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr_pto=sc.

Harrison, Emma G., and Gerard Wynn. 2007. "China Seen Topping U.S. Carbon Emissions in 2007." Reuters.com. <https://www.reuters.com/article/us-carbon-china-idUSL2272661220070323>.

Henderson, Geoffrey, and Paul Joffe. 2016. "China's Climate Action: Looking Back, and Looking Ahead to the 13th Five Year Plan." World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/chinas-climate-action-looking-back-and-looking-ahead-13th-five-year-plan>.

Henderson, Geoffrey, and Paul Joffe. 2016. "5 Questions: What Does China's New Five-Year Plan Mean for Climate Action?" World Resources Institute. <https://www.wri.org/insights/5-questions-what-does-chinas-new-five-year-plan-mean-climate-action>.

Hennida, Citra. 2014. "Upaya Tata Kelola Lingkungan di Cina: Hambatan-hambatannya." *Jurnal Mercubuana*.

Hsu, Sara, and Mercy A. Kuo. 2014. "China's Water Pollution Mire." The Diplomat. <https://thediplomat.com/2014/05/chinas-water-pollution-mire/>.

Hu, Angang. 2016. *China: Innovative Green Development*. 2nd ed. Singapura: Springer Singapore.

- Huaxia. 2020. "Xinhua Headlines Focus: China Makes Historic Progress Over 13th Five Year Plan Period Under Xi's Leadership." Xinhua Net. http://www.xinhuanet.com/english/2020-10/25/c_139466264.htm.
- Hung, Ming T., and Tung C. Tsa. 2012. "Dilemma of Choice: China's Response to Climate Change." *International Studies Association (ISA)*, 3-23. <https://doi.org/10.1590/S0034-73292012000300007>.
- IPCC. n.d. "Chinese Summaries IPCC." IPCC. <https://www.ipcc.ch/report/ar3/wg1/chinese-summaries/>.
- Jiang, Steven. 2012. "Floods Kill 37 in Beijing." CNN. <https://www.cnn.com/2012/07/22/world/asia/china-flooding/index.html>.
- Jing, Hao. 2015. "China's Chemical Industry: The New Forces Driving Change." China Meteorological Administration. http://www.cma.gov.cn/en2014/news/News/201503/t20150316_276750.html.
- Kennedy, Scott. 2015. "Made in China 2025 Center for Strategic and International Studies." Center for Strategic and International Studies |. <https://www.csis.org/analysis/made-china-2025>.
- Keyi, Sheng. 2014. "China's Poisonous Waterways." The New York Times. <https://www.nytimes.com/2014/04/05/opinion/chinas-poisonous-waterways.html>.
- Lai, Wangyang. 2017. "Pesticide use and Health Outcomes: Evidence from Agricultural Water Pollution in China." *Journal of Environmental Economics and Management* Vol.86 (November): 93-120. <https://translate.google.com/website?sl=en&tl=id&hl=id&prev=search&u=https://doi.org/10.1016/j.jeem.2017.05.006>.
- Lampton, David M. 2015. "Xi Jinping and the National Security Commission: Policy Coordination and Political Power." *Journal of Contemporary China*, (Maret), 2-18. <https://doi.org/10.1080/10670564.2015.1013366>.
- Landler, Mark. 2014. "U.S. and China Reach Climate Accord After Months of Talks." The New York Times. <https://www.nytimes.com/2014/11/12/world/asia/china-us-xi-obama-apec.html>.

- Liu, Lei, and Tong Wu. n.d. "EU-China Relationship in a New Era of Global Climate Governance." *Journal School of Public Administration*, 1-16. <https://www.eui.eu/Documents/RSCAS/JMF-25-Presentation/EU-China-relationship-Jul-14.pdf>.
- Ma, Wayne. 2014. "Meet the Biggest Polluter in China's Most Polluted City." *The Wall Street Journal*. <https://www.wsj.com/articles/economics-versus-pollution-in-chinas-dirtiest-city-1410901992>.
- Martina, Michael, and Nick Macfie. 2015. "China's Choking Air Pollution Goes West: Greenpeace." *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/china-pollution/chinas-choking-air-pollution-goes-west-greenpeace-idUKL4N0XJ1JN20150422>.
- Nan, Xu. 2014. "Chinese NGOs Call for 13th Five Year Plan to Include Climate Adaptation." *China Dialogue*. https://chinadialogue-net.translate.goog/en/climate/6889-chinese-ngos-call-for-13th-five-year-plan-to-include-climate-adaptation/?amp&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=op,sc.
- OECD. n.d. "Green Growth in Action: China." *OECD*. <https://www.oecd.org/china/greengrowthinactionchina.htm>.
- Phillips, Tom. 2016. "China Ratifies Paris Climate Change Agreement ahead of G20." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2016/sep/03/china-ratifies-paris-climate-change-agreement>.
- Phillips, Tom, and Luna Lin. 2015. "China Underreporting Coal Consumption by Up to 17%, Data Suggests." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/china-underreporting-coal-consumption-by-up-to-17-data-suggests>.
- Pramisti, Nurul Q. 2016. "Puncak Kegagalan Industri Batu Bara." *Tirto.ID*. <https://tirto.id/puncak-kegagalan-industri-batu-bara-piP>.
- Qin, Liu. 2016. "13th Five-Year Plan is the First to Include PM2.5 Targets." *China Dialogue*. <https://chinadialogue.net/en/pollution/8696-13th-five-year-plan-is-the-first-to-include-pm2-5-targets/>.

- Qin, Liu. 2016. "China's Five Year Plan to Radically Tighten Air Pollution Targets." *Climate Home News*.
<https://www.climatechangenews.com/2016/03/11/chinas-five-year-plan-to-radically-tighten-air-pollution-targets/>.
- Rahman, Anang F., and Siti R. Susanto. 2019. "Ratifikasi Tiongkok atas Perjanjian Paris pada Konferensi Perubahan Iklim 2015." *Jurnal Unair*, (April), 3-14. <https://repository.unair.ac.id/82029/>.
- Reuters. 2014. "China to 'Declare War' on Pollution, Premier Says." Reuters.
<https://www.reuters.com/article/us-china-parliament-pollution-idUSBREA2405W20140305>.
- Reuters. 2020. "China's Xi Targets Steeper Cut in Carbon Intensity by 2030." Reuters.
<https://www.reuters.com/world/china/chinas-xi-targets-steeper-cut-carbon-intensity-by-2030-2020-12-12/>.
- Rongliang, Han. 2002. "China to Invest 700 Billion-yuan for Improving Urban & Rural Environment." *People's Daily*.
http://en.people.cn/200201/31/eng20020131_89701.shtml.
- Ruwitich, John, and Paul Tait. 2014. "China Police Detain 24 After Anti-Incinerator Protest." Reuters.
<https://www.reuters.com/article/uk-china-protests-idUKKBN0HA01720140915>.
- Saeed, Muhammad A. 2011. "China: Tackling Climate Change." *Strategic Studies Journal*, (Januari), 2-17.
https://www.researchgate.net/publication/313770338_China_Tackling_Climate_Change_Strategic_Studies_Journal/link/58a57814a6fdcc0e07657ce4/download.
- Schalk, Owen, and Staughton Lynd. 2022. "On the Development of China's Environmental Policies Towards an Ecological Civilization." MR Online.
<https://mronline.org/2022/11/29/140492/>.
- Seligsohn, Deborah, and Angel Hsu. 2016. "How China's 13th Five Year Plan Addresses Energy and the Environment." *China File*.
<https://www.chinafile.com/reporting-opinion/environment/how-chinas-13th-five-year-plan-addresses-energy-and-environment>.

- Shan, Yuli, Dabo Guan, Heran Zheng, Jiamin Ou, Jing Meng, Zhifu Mi, Zhu Liu, and Qiang Zhang. 2018. "China CO2 Emission Accounts 1997–2015." *SCI Data* 170201 (Januari): 1-10. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.201>.
- Stanway, David, and Robert Birsell. 2014. "Complaints about Air Pollution in China's Capital Double in Five Months." Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-china-pollution-beijing-idUSKBN0EP0A320140614>.
- Swastika, Bunga A. 2014. "Upaya Pemerintah China dalam Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca melalui CDM (Clean Development Mechanism) sebagai Bentuk Implementasi Protokol Kyoto." *Jurnal Unej*, 1-14. <https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/71562/Bunga%20Ayu%20Swastika.pdf?sequence=1>.
- Tan, Monica. 2012. "Social Media, China, and The Environment." *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2012/07/social-media-china-and-the-enviornment>.
- Taylor, Jon. 2020. "Reviewing the Successes of China's 13th Five Year Plan." Qiushi. http://en.qstheory.cn/2020-10/26/c_554120.htm.
- Taylor, Lenore, and Tania Branigan. 2014. "US and China Strike Deal on Carbon Cuts in Push for Global Climate Change Pact." *The Guardian*. <https://www.theguardian.com/environment/2014/nov/12/china-and-us-make-carbon-pledge>.
- Tempo. 2015. "Lima Hal yang Perlu Anda Tahu tentang COP21 di Paris." *Dunia Tempo.co*. <https://dunia.tempo.co/read/723149/lima-hal-yang-perlu-anda-tahu-tentang-cop21-di-paris>.
- Terisiana, Andra. 2018. *Metode Penelitian*. Cetakan I ed. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- UNFCCC. 2018. "China Meets 2020 Carbon Target Three Years Ahead of Schedule." UNFCCC. <https://unfccc.int/news/china-meets-2020-carbon-target-three-years-ahead-of-schedule>.
- United Nations Development Programme. 2016. "13th Five Year Plan: What to Expect from China." United Nations Development Programme.

<https://www.undp.org/china/publications/13th-five-year-plan-what-expect-china>.

The White House. 2014. "U.S.-China Joint Announcement on Climate Change." Obama White House Archives. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/11/us-china-joint-announcement-climate-change>.

The White House. 2016. "U.S.-China Climate Change Cooperation Outcomes | whitehouse.gov." Obama White House Archives. <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/03/fact-sheet-us-china-cooperation-climate-change>.

Wong, Edward. 2013. "Air Pollution Linked to 1.2 Million Premature Deaths in China (Published 2013)." The New York Times. <https://www.nytimes.com/2013/04/02/world/asia/air-pollution-linked-to-1-2-million-deaths-in-china.html>.

Wong, Edward. 2015. "Smog So Thick, Beijing Comes to a Standstill (Published 2015)." The New York Times. <https://www.nytimes.com/2015/12/09/world/asia/beijing-smog-pollution.html>.

Woo, Ryan, and Sam Holmes. 2018. "China Revises 2016 GDP Slightly Lower, Keeps 6.7 Percent Growth Unchanged." Reuters. <https://www.reuters.com/article/us-china-economy-idUSKBN1EU08E>.

Zhang, Zhong X. n.d. "Zhong Xiang Zhang: Environmental Policy Reform." Asia Society. <https://asiasociety.org/policy-institute/zhongxiang-zhang-environmental-policy-reform>.